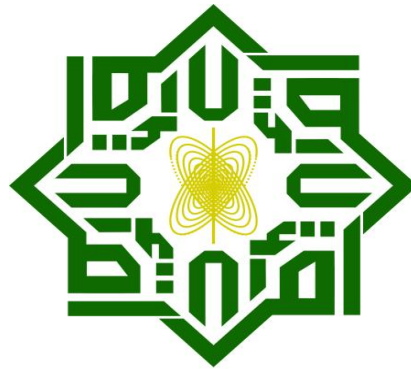


# **SKRIPSI**

## **ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PADA GABUNGAN KELOMPOK TANI DI KECAMATAN TEMBILAHAN**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral *Comprehensive*  
Sarjana S1 Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



**OLEH**

**MUSTIKA YULINDA**

**NIM. 10975007098**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2013**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PADA GABUNGAN KELOMPOK TANI DI KECAMATAN TEMBILAHAN**

Oleh :

**MUSTIKA YULINDA**  
**NIM. 10975007098**

*Penelitian ini dilakukan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah Pengawasan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan sudah berjalan dengan efektif ?, kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, queisioner, dan wawancara. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif yaitu suatu teknik analisa data dengan cara menggambarkan fenomena keadaan yang ditemui dilapangan. Dengan metode ini penulis memaparkan dan menguraikan kata-kata yang didapat, dimana selanjutnya penulis menganalisa dan menginterpretasikan data dan dihubungkan dengan teori kemudian mengambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini, efektivitas pengawasan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan dilihat dari proses pelaksanaan pengawasan, yaitu menetapkan alat ukur atau standar, melakukan tindakan penilaian atau evaluasi, dan melakukan tindakan perbaikan. Dari hasil pengukuran terhadap masing-masing sub indikator penelitian yang dilakukan, maka dapat dinyatakan bahwa efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan sudah terlaksana dan dikategorikan dengan Baik*

## DAFTAR ISI

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PERSEMBAHAN**  
**ABSTRAK**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>

**BAB I    PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	13
1.3. Tujuan Penelitian .....	14
1.4. Manfaat Penelitian .....	14
1.5. Sistematika Penulisan .....	14

**BAB II   TELAAH PUSTAKA**

2.1. Efektivitas .....	16
2.2. Pengawasan .....	20
2.3. Maksud dan Tujuan Pengawasan .....	26
2.4. Peraturan Pengawasan .....	31
2.5. Kelompok Tani .....	37
2.6. Ayat Al-Qur'an yang Berkaitan dengan Pengawasan .....	41
2.7. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan .....	43
2.8. Hipotesis .....	46
2.9. Konsep Operasional .....	47
2.10. Variabel Penelitian .....	48

**BAB III   METODE PENELITIAN**

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian .....	49
3.2. Jenis Data dan Sumber Data .....	49
3.3. Populasi dan Sampel .....	50

3.4. Metode Pengumpulan Data .....	52
3.5. Teknik Analisa Data .....	53
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN</b>	
4.1. Letak Geografis .....	55
4.2 Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.....	56
4.3. Visi dan Misi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir .....	57
4.4. Tujuan Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir .....	59
4.5. Sasaran Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir .....	59
4.6. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir .....	60
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1. Identitas Responden .....	80
a. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	80
b. Identitas Responden Berdasarkan Kelompok Umur ....	81
c. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.	82
5.2. Efektivitas Pengawasan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan .....	83
a. Menetapkan Alat Ukur atau Standar .....	85
b. Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi.....	106
c. Melakukan Tindakan Perbaikan .....	125
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
6.1. Kesimpulan.....	138
6.2. Saran .....	138

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Luas Lahan Sawah yang Sudah Dimanfaatkan dan Belum Dimanfaatkan Perkecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 .....	8
<b>Tabel 1.2</b>	keadaan Kebutuhan, Ketersediaan Beras, Kelebihan dan Kekurangan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 .....	9
<b>Tabel 1.3</b>	Jenis Alat dan Mesin Pertanian yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 .....	10
<b>Tabel 2.1</b>	Jumlah dan Klasifikasi Kelompok Tani di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 .....	44
<b>Tabel 2.2</b>	Jumlah Desa dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 .....	45
<b>Tabel 2.3</b>	Variabel Penelitian .....	48
<b>Tabel 3.1</b>	Penetapan Populasi dan Sampel .....	52
<b>Tabel 5.1</b>	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	80
<b>Tabel 5.2</b>	Identitas Responden Berdasarkan Umur .....	81
<b>Tabel 5.3</b>	Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	82
<b>Tabel 5.4</b>	Tanggapan Responden Mengenai Pembagian Tugas Secara Jelas yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada gabungan kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan	86
<b>Tabel 5.5</b>	Tanggapan Responden mengenai Mutu Pengawasan setelah adanya Pembagian Tugas Secara Jelas oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.....	88
<b>Tabel 5.6</b>	Tanggapan Responden Mengenai Penetapan Waktu Dalam Pencapaian Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.....	90
<b>Tabel 5.7</b>	Tanggapan Responden mengenai Ketepatan Waktu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Melakukan Pengawasan .....	91
<b>Tabel 5.8</b>	Tanggapan Responden Mengenai Kesesuaian Waktu yang Dibutuhkan Kelompok Tani dalam Melakukan Pengawasan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.....	93

<b>Tabel 5.9</b>	Realisasi Fisik dan Anggaran Belanja Langsung APBD Kabupaten pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2011 .....	95
<b>Tabel 5.10</b>	Tanggapan Responden mengenai Biaya (Anggaran) yang diberikan Pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Kelompok Tani .....	101
<b>Tabel 5.11</b>	Tanggapan Responden mengenai transparansi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Kelompok Tani.....	103
<b>Tabel 5.12</b>	Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Menetapkan Alat Ukur atau Standar Pengawasan yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan.....	105
<b>Tabel 5.13</b>	Tanggapan Responden Mengenai Laporan Tertulis dalam Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.....	107
<b>Tabel 5.14</b>	Tanggapan Responden mengenai Penindaklanjutan Laporan yang diberikan Kelompok Tani kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.....	108
<b>Tabel 5.15</b>	Tanggapan Responden Mengenai apakah Penindaklanjutan Laporan yang diberikan Kelompok Tani kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sudah berjalan dengan Baik .....	110
<b>Tabel 5.16</b>	Tanggapan Responden Mengenai Kunjungan Langsung yang Dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.....	111
<b>Tabel 5.17</b>	Tanggapan Responden Mengenai Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir .....	114
<b>Tabel 5.18</b>	Tanggapan Responden Mengenai Ketepatan Waktu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Melakukan Kunjungan Langsung .....	116
<b>Tabel 5.19</b>	Tanggapan Responden Mengenai Apakah Kunjungan Secara Langsung oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Sudah Berjalan Dengan Baik.....	118

<b>Tabel 5.20</b>	Tanggapan Responden Mengenai Pengamatan Hasil Kinerja yang Dilakukan Oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Gabungan Kelompok Tani.....	119
<b>Tabel 5.21</b>	Tanggapan Responden Mengenai Apakah Rutin Pengamatan Hasil Kerja yang Dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.....	121
<b>Tabel 5.22</b>	Tanggapan Responden Mengenai Apakah Pengamatan Hasil Kerja yang Dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sudah Berjalan Dengan Baik	122
<b>Tabel 5.23</b>	Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi dalam Pengawasan yang Dilakukan Oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan.....	124
<b>Tabel 5.24</b>	Tanggapan Responden Mengenai Pemberian Teguran atau Peringatan Terhadap penyimpangan oleh Kelompok Tani yang Dilakukan Oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.....	126
<b>Tabel 5.25</b>	Tanggapan Responden Mengenai Apakah Pemberian Teguran atau Peringatan yang Dilakukan Oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Sudah Berjalan Dengan Baik .....	128
<b>Tabel 5.26</b>	Tanggapan Responden Mengenai Tindakan Perbaikan yang Dilakukan Oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.....	130
<b>Tabel 5.27</b>	Tanggapan Responden Apakah Rutin Melakukan Tindakan Perbaikan yang Dilakukan Oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.....	132
<b>Tabel 5.28</b>	Tanggapan Responden Mengenai Mutu Jalan Keluar yang Dilakukan Oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir .....	133
<b>Tabel 5.29</b>	Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Melakukan Tindakan Perbaikan Terhadap Kelompok Tani yang Dilakukan Oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.....	135
<b>Tabel 5.30</b>	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator-Indikator Efektivitas Pengawasan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.....	136

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam usaha untuk mewujudkan suatu tujuan organisasi atau lembaga yang telah digariskan maka tidak dapat terlepas dari tugas manajemen yaitu pengawasan terhadap jalannya semua kegiatan yang ada dalam organisasi atau lembaga tersebut.

Organisasi merupakan bentuk kerjasama atau persekutuan antara dua orang atau lebih yang saling bekerja sama secara formal, terkait dalam rangkaian pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan dimana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut sebagai atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Keberadaan dan nilai-nilai manusia sangat menonjol dalam aktifitas organisasi artinya suatu organisasi dalam usaha mewujudkan suatu tujuannya sangat tergantung kepada manusianya, sebab betapapun sempurnanya aspek ekonomi maupun teknologi, tanpa adanya sumber daya manusia yang bagus maka sulit dalam mencapai suatu tujuan organisasi.

Pelaksanaan pengawasan itu penting artinya bagi organisasi baik instansi maupun perusahaan swasta, karena dengan adanya pelaksanaan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan dalam suatu perusahaan maka akan dapat diketahui kesalahan-kesalahan



maupun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari pelaksanaan suatu pekerjaan. Dengan demikian diharapkan pegawai atau karyawan waspada atau dapat melaksanakan pekerjaan terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat sehingga dengan diadakannya pelaksanaan pengawasan diharapkan tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai dengan baik.

S.P. Siagian (2004:125) pengawasan adalah proses pengamatan dari proses pelaksanaan saluran kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Salah satu makna yang terkandung dalam definisi pengawasan tersebut yaitu pengawasan dilakukan dengan maksud agar tidak adanya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan sehingga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan sempurna, serta apabila pengawasan dilakukan dengan tidak optimal maka berdampak pada hasil yang ingin dicapai, sehingga tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sulit dalam mencapainya.

Pengawasan yang dilaksanakan bukan ditujukan untuk mencari yang salah, melainkan untuk memahami apa yang salah dan mengoptimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan serta mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam UU No 32 Tahun 2004 terdapatnya suatu Otonomi Nyata dan Bertanggung jawab. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah dibidang tertentu, yang secara nyata dan ada diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan kepala daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam pencapaian otonomi daerah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintah yang bersifat wajib yaitu urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, adapun pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar. Sedangkan urusan pemerintah yang bersifat pilihan yaitu meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan yang bersangkutan.

Dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi dan desentralisasi secara bersama-sama, dengan penekanan yang bergeser secara dinamis dari waktu ke waktu dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.

Pengawasan dilakukan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, yang meliputi :

- a. Pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi terdiri atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta urusan Pemerintahan menurut asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota atas pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta urusan Pemerintahan menurut tugas pembantuan.
- c. Pelaksanaan urusan Pemerintahan di Desa yang terdiri atas pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Urusan Pemerintahan Desa.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai fungsi dan kewenangannya.

Pengawasan akan berlangsung efektif apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan yaitu teknik pengawasan harus sesuai dengan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan tersebut.
2. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana yaitu pengawasan harus mampu mendeteksi deviasi atau penyimpangan yang mungkin terjadi sebelum penyimpangan itu menjadi kenyataan.
3. Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategis tertentu. Prinsip ini pada dasarnya berarti bahwa karena aneka ragam dan luasnya cakupan tanggung jawab, seorang manajer harus mampu menentukan kegiatan apa yang perlu dilakukannya sendiri dan kegiatan apa pula yang sebaiknya didelegasi kepada orang lain.
4. Objektivitas dalam melakukan pengawasan. Salah satu komponen yang harus jelas terlihat dalam rencana adalah standar prestasi kerja yang diharapkan dipenuhi oleh para pelaksana kegiatan operasional.
5. Keluwesan pengawasan. Maksudnya adalah pengawasan harus bersifat fleksibel.
6. Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi.
7. Efisiensi pelaksanaan pengawasan. Pengawasan dilaksanakan supaya keseluruhan organisasi bekerja dengan tingkat efisiensi yang semakin tinggi. Oleh karena itu pengawasan sendiri harus segera diselenggarakan dengan tingkat efisiensi yang tinggi pula.

8. Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat. Maksudnya para manajer selaku pelaksana kegiatan pengawasan harus dapat menentukan teknik pengawasan bagaimana yang dibutuhkan, dan alat bantu apa saja yang perlu dikuasai.
9. Pengawasan mencari apa yang tidak beres. Artinya pengawasan yang baik harus menemukan apa yang salah dan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut.
10. Pengawasan harus bersifat membimbing. Berarti pengawasan yang tidak berakibat pada kondisi ketika para bawahan selalu diancam dengan hukuman setiap kali ia berbuat kesalahan. ( S.P Siagian. 2004: 130 )

Dalam visi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir bahwa Kabupaten Indragiri Hilir akan mewujudkan daya saing dengan memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah. Dengan demikian jelas bahwa sektor pertanian merupakan sektor penting dalam rangka mewujudkan Misi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tujuan pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir sejalan dengan Tujuan Pembangunan Pertanian secara Nasional yaitu:

1. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani,
2. Memenuhi kebutuhan pangan,

3. Menciptakan lapangan kerja,
4. Menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya alam,
5. Menumbuhkan agribisnis berskala ekonomi melalui pengembangan sentra produksi,
6. Meningkatkan mutu gizi melalui penganekaragaman jenis pangan.

Adapun sasaran yang hendak dicapai yaitu :

1. Terwujudnya ketersediaan bahan baku pangan asal pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indragiri Hilir.
2. Terwujudnya usaha agribisnis yang tangguh dengan menghasilkan peroduk pertanian yang berkualitas dan berdaya saing,
3. Tersedianya infrastruktur dibidang pertanian yang fungsioanal dengan sumberdaya manusia yang tangguh dan perofesioanal didalam melestarikan sumberdaya pertanian dan lingkungan hidup.

Penyelenggaraan aktifitas yang berada pada kelompok tani/gabungan kelompok tani (Gapoktan) Kabupaten Indragiri Hilir memerlukan suatu pengawasan dari instansi yang berwenang agar kelompok tani tersebut dapat berfungsi sebagai mana yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran penting dalam mengawasi segala kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani

Kecamatan Tembilahan atau gabungan kelompok tani(Gapoktan) di kecamatan lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir.

**Tabel 1.1.**  
**Luas Lahan Sawah Yang Sudah Dimanfaatkan dan Belum Dimanfaatkan**  
**Perkecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011**

No	Kecamatan	Potensi (Ha)			Sudah dimanfaatkan (Ha)	Belum dimanfaatkan (Lahan Sawah)	
		Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah *)	Jumlah		(Ha)	(%)
1	Keritang	7.408	727	8.135	7.408	-	-
2	Reteh	3.150	-	3.150	3.150	-	-
3	Enok	276	789	1.065	255	21	7,61
4	Tanah Merah	128	73	201	26	102	79,69
5	Kuindra	712	870	1.582	649	63	8,85
6	Tembilahan	2.189	76	2.265	2.026	163	7,45
7	Tempuling	1.715	479	2.194	1.715	-	-
8	Bt. Tuaka	5.580	1.412	6.992	4.176	1.404	25,16
9	GAS	1.259	1.564	2.823	1.233	26	2,06
10	Gaung	2.970	4.374	7.344	1.013	1.957	65,89
11	Mandah	20	480	500	-	20	100,00
12	Kateman	-	-	-	-	-	-
13	Kemuning	-	1.752	1.752	-	-	-
14	Tbh. Hulu	2.517	105	2.622	2.258	259	10,29
15	P. Burung	-	-	-	-	-	-
16	Pelangiran	-	100	100	-	-	-
17	Teluk Belengkong	-	-	-	-	-	-
18	Concong	129	233	362	52	77	59,69
19	Kempas	1.858	65	1.923	1.858	-	-
20	Sungai Batang	2.320	1.030	3.350	2.189	131	5,65
	<b>Jumlah</b>	<b>32.231</b>	<b>14.129</b>	<b>46.360</b>	<b>28.008</b>	<b>4.222</b>	<b>13,10</b>

Keterangan \*) : Sementara tidak ditanami

**Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir 2011**

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah gabungan kelompok tani pada tahun 2011 sebesar 14.129 (Ha) Sawah yang belum ditanami untuk sementara dengan potensi lahan 46.360 (Ha), serta terdapatnya lahan yang belum dimanfaatkan sekitar 4.222 (Ha). Jika dikurangi jumlah lahan dengan jumlah lahan yang sudah dimanfaatkan maka 18.352 (Ha) yang belum dimanfaatkan oleh petani.

**Tabel 1.2**

**Keadaan Kebutuhan, Ketersediaan Beras, Kelebihan dan Kekurangan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011**

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Tersedian ya untuk konsumsi (Ton)	Kebutuha n beras	Kelebihan/ kekurangan Tahun 2011
1	Keritang	63.636	19.575,09	6.857,42	12.717,67
2	Reteh	43.722	7.565,83	4.711,48	2.854,35
3	Enok	34.129	60,51	3.677,74	-3.617,23
4	Tanah Merah	31.009	52,35	3.341,53	-3.289,18
5	Kuindra	19.349	1.768,41	2.085,05	-316,63
6	Tembilahan	72.001	4.935,23	7.758,83	-2.823,60
7	Tempuling	30.579	3.624,05	3.295,19	328,86
8	Bt. Tuaka	27.244	9.270,02	2.935,81	6.334,21
9	GAS	22.100	2.610,09	2.381,50	228,59
10	Gaung	29.918	5.343,13	4.301,56	1.041,57
11	Mandah	29.938	-	4.303,72	-4.303,72
12	Kateman	45.350	-	4.886,92	-4.886,92
13	Kemuning	30.697	1.117,14	3.307,91	-2.190,77
14	Tbh. Hulu	44.177	5.619,65	4.760,51	859,13
15	P. Burung	22.335	-	2.406,82	-2.406,82
16	Pelangiran	43.568	-	4.694,89	-4.694,89
17	Tl. Belengkong	16.690	-	1.798,51	-1.798,51
18	Concong	13.258	244,07	1.428,68	-1.184,61
19	Kempas	33.750	4.053,82	3.636,90	416,92
20	Sungai Batang	12.248	5.219,66	1.319,84	3.899,81
	<b>Jumlah</b>	<b>685.698</b>	<b>71.059,05</b>	<b>73.890,82</b>	<b>-2.831,76</b>



**Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir 2011**

Dari tabel diatas didapatkan informasi bahwa produksi padi di Kabupaten Indragiri Hilir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, meskipun ada beberapa kecamatan yang jumlah produksinya melebihi kebutuhan yaitu Kecamatan Keritang, Reteh, Tempuling, Batang Tuaka, GAS, Gaung, Tembilahan Hulu, Kempas dan Sungai Batang.

**Tabel 1.3**  
**Jenis Alat dan Mesin Pertanian yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2011**

No	Jenis Alat/Mesin dan Kelembagaan Pertanian	Kondisi Baik*)	Rusak Berat**)	Jumlah
1	Pengolahan Lahan			
	a. Traktor Roda Dua			
	1. Kecil (< 6 PK)	36	9	45
	2. Sedang (6-8,5 PK)	33	8	41
	3. Besar (>8,5 PK)	25	15	40
	b. Traktor Roda Empat			
	1. Traktor Mini (<25PK)	-	-	-
	2. Traktor Sedang (<25-50PK)	-	-	-
	3. Traktor Besar (>50PK)	-	-	-
2	Penanaman			
	a. Jabber	-	-	-
	b. Seeder	-	-	-
	c. Transplanter	-	-	-
3	Pemupukan			
	a. Pembenam Pupuk	-	-	-
	b. Penebar Pupuk	-	-	-
4	Pengendalian OPT			
	a. Hand Sprayer	6.767	504	7.271
	b. Knapsack Power Sprayer	2	6	8
	c. Skid Power Sprayer	-	-	-
	d. Swing-Fog	-	-	-
	e. Emposan Tikus	-	-	-
	f. Pembersih Gulma Manual	3.321	-	3.321
	g. Pembersih Gulma Bermesin (Power Weeder)	-	-	-

5	Pengairan			
	a. Pompa Air			
	1. Diameter 2	2	-	2
	2. Diameter 3	5	-	5
	3. Diameter 4	28	4	32
	4. Diameter 6	-	-	-
	5. Diameter Lainnya	85	27	112
	b. Irigasi Curah	-	-	-
	c. Irigasi Tetes	-	-	-
6	Pemanenan			
	a. Sabit Bergerigi	16.026	411	16.437
	b. Resper	11	3	14
	c. Combine Harvester	-	-	1
	d. Stripper	37	1	38
7	Perontok/Pemipil			
	a. Perontok Padi	-	1	1
	1. Pedal Thresher	18	10	28
	2. Power Thresher	255	69	324
	b. Pemipil Jagung	80	14	94
	c. Perontok Kedelai	-	-	-
	d. Perontok Multiguna	3	1	4
8	Pembersih Gabah	2	-	2
9	Pengeringan			
	a. Box Dryer	26	4	30
	b. Continous Dryer	-	-	-
10	Penggilingan			
	a. Penggilingan Padi Besar	34	8	42
	b. Penggilingan Padi Kecil	48	4	52
	c. Rice Milling Unit	232	2	234
	d. Pemecah Kulit	63	-	63
	e. Pemisah Gabah dengan Beras	-	-	-
	f. Penyosoh Beras Pecah Kulit	-	-	-
	g. Penggiling Jagung	-	-	-
11	Pengolahan			
	a. Pamarut Ubi Kayu	75	20	95
	b. Pembuat Chip	-	-	-
	c. Penepung	11	1	12
	d. Pembuat Pellet	2	-	2
	e. Perajang	-	-	-
	f. Penyawut	-	-	-
	g. Grader (untuk kacang tanah/kedelai)	-	-	-
12	Pembuatan Pupuk Organik/Kompos			
	1. Pencacah/Penghancur	9	-	9

	2. Pencampur(mixer)	1	-	1
13	Cold Storage	-	-	-

Keterangan

\*) Termasuk yang rusak ringan yang masih dapat diperbaiki

\*\*) Tidak dapat digunakan lagi (secara ekonomi tidak layak diperbaiki)

***Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan  
Kabupaten Indragiri Hilir 2011***

Dari data pada tabel tersebut terlihat bahwa ada beberapa jenis alat/mesin dan kelembagaan yang belum dimiliki, terutama untuk alat dan mesin pengolahan hasil pertanian. Selain itu banyak juga mesin yang rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Kemudian juga terdapat permasalahan yaitu ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan seperti kegiatan pengembangan sumberdaya pertanian di desa kuala sebatu dikarenakan kelalaian pihak ketiga, dan adanya sisa tender dan kegiatan yang tidak dibayarkan karena putus kontrak.

Dari keterangan diatas diperlukan untuk melakukan pengawasan yang lebih baik dimana dilakukan pengawasan kinerja terhadap kelompok tani agar lahan-lahan yang berpotensi bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mencapainya suatu tujuan kelompok tani. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir harus lebih aktif berperan untuk meningkatkan perhatiannya kepada kelompok tani. Pengawasan kepada kelompok tani merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui apakah suatu pekerjaan itu berjalan dengan lancar atau tidak dan apabila terdapat kesalahan dapat memperbaikinya segera mungkin.

Atas permasalahan tersebut, maka pertanyaan yang muncul adalah “Bagaimanakah Efektivitas Pengawasan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam rangka untuk menciptakan masyarakat mandiri dan kesejahteraan masyarakat pertanian. Karena keterbatasan waktu dan biaya maka hal ini fokus kepada salah satu gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) di kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik meneliti tentang *“Analisis Efektivitas Pengawasan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan”*

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membahas permasalahan yang berhubungan dengan Efektifitas Pengawasan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan. Penulis memfokuskan penelitian ini pada permasalahan yaitu: *”Apakah Pengawasan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan Sudah Berjalan Efektif ?”*

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu: *Untuk Mengetahui Efektivitas Pengawasan Yang Dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan.*

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan kepada penulis terhadap pentingnya pengawasan dalam suatu kelompok tani,
2. Untuk menambah referensi kepustakaan,
3. Untuk memberikan rekomendasi atau masukan tentang pemecahan masalah bagi objek penelitian,
4. Untuk referensi atau petunjuk penelitian berikutnya.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis membaginya kedalam tiga bab sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II: TELAAH PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini dijelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis data dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN**

Dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran umum tempat penelitian dan tugas-tugas jabatan struktural di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini dijelaskan hasil penelitian yang dijawab oleh para responden yang berjumlah 95 dari masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani.

**BAB VI : PENUTUP**

Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan diatas, dan diberikan saran-saran dari pembahasan sebelumnya.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Efektivitas**

Ali Gunawan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:113) Efektivitas lebih bermakna pada hasil guna yaitu hasil dari suatu kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatan .

Efektivitas menurut Sumaryadi (2005:105) adalah seberapa baik pekerjaan itu dilakukan, sejauhmana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan lainnya.

Menurut SP. Siagian (2002:151) Efektif adalah tercapainya sasaran yang ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang dialokasikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu.

Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya berhasil atau tidaknya pekerjaan itu dilakukan (Kumorotomo, 2005:362).

Menurut Kurniawan (2005:109) Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya, dalam melaksanakan kegiatan akan terdapatnya program agar

tidak melenceng dari tujuan awal sebuah organisasi. Dengan kemampuan beradaptasi pada lingkungan maka organisasi tersebut dapat berintegrasi sasaran dan kegiatan secara menyeluruh.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) input terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2007:92).

M. As'ad (2001:47) Menjelaskan setiap pekerjaan dapat dikatakan efektif ditentukan oleh pencapaian sasaran yang ditetapkan dan dengan menggunakan waktu yang dicapai.

Menurut pendapat Gibson Ivancevich Donnelly (dalam Nadia Azlin, 2012:18) menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, sebagai berikut :

1. Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
2. Efisiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input.
3. Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Keunggulan adalah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.



5. Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

Dengan dikemukakan penjelasan ukuran efektivitas organisasi maka suatu standar akan terpenuhnya sasaran dan tujuan untuk pencapaian tingkat program atau kegiatan-kegiatan organisasi dalam melaksanakan fungsi yang optimal.

Menurut pendapat Richard M. Steers (dalam Nadia Azlin, 2012:19) mengatakan beberapa ukuran dari efektivitas, yaitu :

1. Kualitas artinya kualita yang dihasilkan oleh organisasi.
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan.
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik.
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi.
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya.
7. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu.

8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu.
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki.
10. Motivasi adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan.
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan.
12. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektifitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efisien tetapi tidak efektif berarti dalam memanfaatkan sumberdaya (input) baik, tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumberdaya yang berlebihan atau lazim dikatakan ekonomi biaya tinggi. Tetapi yang paling parah adalah

tidak efisien dan juga tidak efektif, artinya ada pemborosan sumber daya atau penghambur-hamburan sumber daya tanpa mencapai sasaran. Efisiensi harus selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur, sedangkan efektif mengandung pula pengertian kualitatif.

Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efisien dalam menggunakan masukan akan menghasilkan produktifitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya. Hal yang paling rawan adalah apabila efisiensi selalu diartikan sebagai suatu penghematan, karena bisa mengganggu operasi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktifitasnya juga tidak setinggi yang diharapkan.

## **2.2 Pengawasan**

S.P. Siagian (2004:125) pengawasan adalah proses pengamatan dari proses pelaksanaan saluran kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

S.P. Siagian (2004:40) mengawasi berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional dilapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya sementara kegiatan operasional sedang berlangsung. Maksudnya ialah untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya.

S.P. Siagian (2003:253) pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun pengawasan yang dilakukan dengan cara :

1. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi langsung.
2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya dari jauh berupa laporan yang telah disampaikan oleh bawahannya, laporan ini dapat berupa tertulis dan lisan.

Mardiasmo (2004:213) pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintah.

Pengawasan adalah keseluruhan dari upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai dengan rencana, tetapi juga dengan tingkat efesiensi dan efektifitas yang setinggi mungkin.

Sujamto (2004:12) pengawasan adalah segala usaha kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Winardi (2003:15) tindakan pengawasan itu harus mendeterminasikan apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi prestasi kerja, dan jika perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

Kartini Kartono (2002:153) Menjelaskan bahwa pada umumnya para pengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran dengan tujuan umum organisasi, pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan tersebut. Pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan sudah berlangsung atau belum. Hal ini berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dengan program yang telah direncanakan. Pengawasan melekat adalah kegiatan mengamati, observasi, menilai, mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara struktural, yang dilakukan secara kontiniu dan berkesinambungan.

Menurut Kansil (2002:12) Pengawasan itu sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah dan terencananya

pembangunan pada umumnya, dalam organisasi pemerintah pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin :

- a. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- b. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah meliputi :

- a. Pengawasan umum. Dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. Yang melakukan pengawasan umum adalah menteri dalam negeri, kepala wilayah yaitu Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Daerah sebagai Pemerintah Daerah.
- b. Pengawasan prevektif. Dimana mengharuskan setiap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu berlalu sesudah mendapat pengawasan.
- c. Pengawasan refresif. Menyangkut penagguhan atau pembatasan peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau perundangan yang tingkatnya lebih tinggi.

Ernie dan Kurniawan (2005:317) Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam

menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Ernie dan Kurniawan (2005:321) untuk melaksanakan pengawasan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menetapkan standar dan metode penilaian kinerja
2. Penilaian kinerja
3. Penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak
4. Pengambilan tindakan koreksi.

Untuk melaksanakan pengawasan dalam upaya merealisasikan tujuan haruslah melalui suatu proses atau langkah-langkah yaitu terdiri dari tiga fese, hal ini digunakan oleh Manullang (2002 : 184) diantaranya sebagai berikut:

1. Menetapkan alat ukur atau standar, yaitu :
  - a. Adanya pembagian tugas secara jelas
  - b. Adanya waktu pencapaian tujuan
  - c. Adanya biaya untuk pencapaian tujuan
2. Melakukan tindakan penilain atau evalusi, dapat dilakukan dengan cara seperti :

- a. Laporan tertulis dari pada pegawai baik rutin maupun istimewa.
  - b. Melakukan kunjungan langsung.
  - c. Mengamati hasil kerja.
3. Melakukan tindakan perbaikan yaitu yang diambil untuk menyesuaikan pekerjaan yang senyatanya menyimpang agar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. adapun tindakan perbaikan yang dilakukan adalah :
- a. Memberi teguran.
  - b. Memberikan peringatan
  - c. Melakukan perbaikan atas terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam mencari jalan keluar.

Nanang Fattah (2004:102) mengatakan pengawasan harus dipandang sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketepatan korektif sebagai hal akhir proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima. Kemudian, ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan agar pengawasan ini dapat berfungsi efektif antara lain :

- 1) Pengawasan harus dikaitkan dengan tujuan.
- 2) Standar yang masih dapat dicapai harus ditentukan, ada dua tujuan pokok yaitu : untuk memotivasi dan untuk dijadikan patokan guna membandingkan dengan prestasi, artinya jika pengawasan ini efektif dan dapat memotivasi seluruh anggota untuk mencapai prestasi tinggi.
- 3) Pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi.



- 4) Banyaknya pengawasan harus dibatasi, artinya jika pengawasan terhadap bawahan terlampau sering, ada kecenderungan mereka kehilangan otonomnya dan dapat dipersepsi pengawasan penyelewengan.
- 5) Sistem pengawasan harus dikemudi tanpa mengorbankan otonomi dan kehormatan pimpinan tetapi fleksibel, artinya sistem pengawasan menunjukkan kapan dan dimana tindakan koreksi harus diambil.
- 6) Pengawasan hendaknya mengacu pada tindakan perbaikan artinya tidak hanya mengungkap penyimpangan dari standar tetapi pada penyediaan perbaikan, menentukan tindakan perbaikan.
- 7) Pengawasan hendaknya mengacu pada prosedur pemecahan masalah, menemukan penyebab, membuat rancangan pengulangan, melakukan perbaikan, mengecek hasil perbaikan dan mencegah masalah serupa.

### **2.3 Maksud dan Tujuan Pengawasan**

Terwujudnya suatu tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain dari pada tujuan dari pengawasan. Sebab setiap organisasi dalam melakukan suatu tujuan tentu mempunyai maksud dan tujuan tertentu agar rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan maksimal. Menurut Situmorang dan Juhir (2001:22) beliau mengatakan maksud dari pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.

2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standard.

Rachman (dalam Situmorang dan Juhir, 2001:22) juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.

4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki kearah yang lebih baik. Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan, Maman Ukas (2004:337) mengatakan tujuan pengawasan yaitu :

1. Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
2. Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.
3. Setelah kedua hal diatas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada yang diharapkan.

Situmorang dan Juhir (2001:26) mengatakan bahwa tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (Kontrol sosial) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab.
2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.
3. Agar adanya keluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Lebih lanjut beliau juga mengemukakan bahwa secara langsung tujuan pengawasan adalah untuk :

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Menurut Griffin (dalam Ernie dan Kurniawan : 2005:318) menjelaskan bahwa terdapat empat tujuan dari fungsi pengawasan yaitu :

1. Adaptasi Lingkungan

Adaptasi Lingkungan adalah agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dilingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal, maupun lingkungan yang bersifat eksternal.

2. Meminimumkan Kegagalan

Meminimumkan Kegagalan adalah untuk meminimumkan kegagalan ketika perusahaan melakukan kegiatan produksi.

3. Meminimumkan Biaya

4. Antisipasi Kompleksitas Organisasi

Antisipasi Kompleksitas Organisasi adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks.

Sementara tujuan pengawasan menurut Soekarno (dalam Safrudin, 2002:36) adalah untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan, mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas ditentukan, mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat diketahui bahwa tujuan dari pengawasan adalah :

1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah dibuat.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.

## **2.4 Peraturan Pengawasan**

Dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi dan desentralisasi secara bersama-sama, dengan penekanan yang bergeser secara dinamis dari waktu ke waktu dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.

Pengawasan dilakukan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, yang meliputi :

- a. Pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Provinsi terdiri atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat wajib dan

pilihan serta urusan pemerintahan menurut asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

- b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan.
- c. Pelaksanaan urusan Pemerintahan di desa yang terdiri atas pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Urusan Pemerintahan Desa.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai fungsi dan kewenangannya.

Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi adalah :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;

- b. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya; dan
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya.

Mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan proses pengawasan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan obyek pemeriksaan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka :

- a. Pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara terus menerus (*series of actions and on going basis*).
- b. Diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2010, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas



pembantuan di bidang pertanian serta dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan tanaman pangan , hortikultura dan peternakan
- c. Pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan tugas di bidang tanaman pangan , hortikultura dan peternakan
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2010 yaitu terdapatnya Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi jabatan struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir yang mana untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) yang salah satunya mempunyai tugas Pembinaan dan Pengawasan antara lain yaitu :

1. Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang yaitu:
  - A. Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

- a. Pembinaan dan pengawasan lingkup pengembangan usaha, peningkatan intensitas pertanaman, dan diversifikasi usaha tanaman pangan ;
- b. Pembinaan dan pengawasan Hortikultura lingkup pengembangan usaha dan peningkatan produksi serta diversifikasi usaha tanaman hortikultura ;
- c. Pembinaan dan pengawasan perlindungan tanaman pangan hortikultura lingkup pencegahan, pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura.

B. Pengelolaan Lahan dan Air

- a. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan lahan lingkup pengelolaan lahan usaha tanaman pangan, hortikultura dan peternakan serta mekanisme pertanian pra panen ;
- b. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan air usaha tanaman pangan dan hortikultura ;
- c. Pembinaan dan pengawasan perluasan areal usaha tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

C. Pengolahan dan Pemasaran Hasil

- a. Pembinaan dan pengawasan lingkup pengembangan usaha ;
- b. Pembinaan dan pengawasan lingkup pengembangan alat dan mesin pasca panen dan pengolahan hasil serta diversifikasi olahan hasil produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan ;

- c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan promosi, pemasaran dan informasi pasar.

Menteri Pertanian melakukan pengawasan teknis pelaksanaan pelayanan bidang pertanian oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar bidang pertanian kepada masyarakat petani.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU RI No. 41 Tahun 2009) yaitu untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja :

1. Perencanaan dan Penetapan;

Untuk melakukan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka dilakukan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, adapun perencanaan yang dilakukan yaitu :

- a. Perencanaan jangka panjang;
- b. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaan tahunan.

2. Pengembangan

Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan yang dilakukan dengan :

- a. Peningkatan kualitas benih/bibit;
- b. Mencegah dan penanggulangan hama tanaman;

c. Pemanfaatan teknologi pertanian.

## 2. Pemanfaatan

Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air yang meliputi :

- a. Pelestarian sumber daya lahan dan air;
- b. Pengelolaan kualitas lahan dan air.

## 3. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan yaitu terkait dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pembinaan yang dimaksud meliputi :

- a. Pemberian bimbingan dan konsultasi;
- b. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat.

## 4. Pengendalian

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian :

- a. Insentif;
- b. Penyuluhan.

## 2.5 Kelompok Tani

Miftah Thoha (2008:79) kelompok merupakan bagian dari kehidupan manusia. Tiap hari manusia akan terlibat dalam aktivitas kelompok. Demikian pula kelompok merupakan bagian dari kehidupan organisasi , dalam organisasi akan banyak dijumpai kelompok-kelompok ini. Hampir pada

umumnya manusia yang menjadi anggota dari sesuatu organisasi besar atau kecil adalah sangat kuat kecenderungannya untuk mencari keakraban dalam kelompok-kelompok tertentu. Dimulai dari adanya kesamaan tugas pekerjaan yang dilakukan, kedekatan tempat kerja, seringnya berjumpa, dan barang kali adanya kesamaan kesenangan bersama, maka timbullah kedekatan satu sama lain, mulailah mereka berkelompok dalam organisasi tertentu.

Kelompok formal adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, anggota-anggotanya biasanya diangkat oleh organisasi. Tetapi itu tidak harus pada sedemikian pada setiap kasus. Sejumlah orang yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas tertentu merupakan bentuk dari kelompok formal ini. Adapun kelompok informal adalah suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Anggota kelompok tidak diatur dan diangkat. Keanggotaan ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Kelompok informal ini sering timbul berkembang dalam kelompok formal, karena adanya beberapa anggota yang secara tertentu mempunyai nilai-nilai yang sama yang perlu ditularkan sesama anggota lainnya. Kadangkali kelompok informal berkembang atau keluar dari organisasi formal.

Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kelompok tani dipimpin oleh seorang ketua kelompok, yang dipilih atas dasar musyawarah dan mufakat diantara anggota kelompok tani. Pada waktu pemilihan ketua kelompok tani sekaligus dipilih kelengkapan struktur organisasi kelompok tani yaitu sekretaris kelompok, bendahara kelompok, serta seksi-seksi yang mendukung kegiatan kelompoknya. Seksi-seksi yang ada disesuaikan dengan tingkat dan volume kegiatan yang akan dilakukan. Masing-masing pengurus dan anggota kelompok tani harus memiliki tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang jelas dan dimengerti oleh setiap pemegang tugasnya. Selain itu juga kelompok tani harus memiliki dan menegakkan peraturan-peraturan yang berlaku bagi setiap kelompoknya dengan sanksi-sanksi yang jelas dan tegas.

Kelompok Tani adalah suatu kelompok yang terdiri dari berbagai anggota yang saling bekerja sama dalam menaai suatu tujuan. Adapun jumlah kelompok tani di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2011 sebanyak 1.495 kelompok dengan jumlah anggota 38.935 orang yang terbesar di 20 kecamatan. Kelompok-kelompok tani yang ada membentuk gabungan dari beberapa kelompok yang dinamakan Gapoktan.

Kelompok tani ini dikelompokkan menjadi beberapa kelas kelompok, pengelompokan ini melalui pengukuhan kelompok berdasarkan tingkat kedinamisannya. Pengukuhan kelompok tani merupakan proses pembinaan untuk mengetahui kemampuan kelompok yang berturut-turut terdiri dari kelas pemula, lanjut, madya dan utama.

Adapun program-program yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan pada kelompok tani yaitu :

1. Program peningkatan kesejahteraan petani
  - a. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku Agribisnis.
2. Program peningkatan ketahanan pangan
  - a. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
  - b. Pengembangan pertanian untuk lahan kering
  - c. Pengembangan perbenihan/pembibitan
  - d. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
  - a. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah
  - b. Pengelolaan informasi permintaan pasar
  - c. Penyuluhan distribusi pemasarah.
4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
  - a. Penyediaan sarana-prasarana teknologi pertanian
  - b. Kegiatan penyuluhan penerapan
5. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
  - a. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
  - b. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

## 2.6 Ayat Al-Quran yang Berkaitan dengan Pengawasan

Islam adalah agama yang universal, integral dan menyempurnakan bagi semua sistem yang ada. Dengan kata lain sesungguhnya Allah SWT jauh-jauh sebelumnya telah memberikan konsep yang paling sempurna untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh manusia, konsep tersebut dinamakan muraqabah.

Muraqabah adalah pengawasan yang sebenarnya. Karena ia merupakan sistem pengawasan dari bagi individu bukan hanya sebatas dalam kaintannya dengan aspek-aspek materi keduniaan belaka, namun jauh menembus batas dan kemampuan dengan nilai-nilai keabadian dan kekuatan yang berada diluar kemanusiaan dan kealaman itu sendiri.

Adapun Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan Pengawasan yaitu :

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Sesungguhnya Allah Maha Mengawasi kamu sekalian” (QS an-Nisaa’:1).

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

Artinya : “Dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu” (QS al-Ahzaab:52).



وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ،  
وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Artinya :“Dan akulah yang menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan (angkat) aku, Engkau-lah Yang Maha Mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu” (QS al-Maa-idah:117).

Maka makna ar-Raqiib (yang maha Mengawasi) secara lebih terperinci adalah: zat yang maha memperhatikan/mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada/hati manusia, yang maha mengawasi apa yang diusahakan setiap diri manusia, yang maha memelihara semua makhluk dan menjalankan mereka dengan sebaik-baik aturan dan sesempurna-sempurna penataan, yang maha mengawasi semua yang terlihat dengan penglihatan-Nya yang tidak ada sesuatupun yang luput darinya, yang maha mengawasi semua yang terdengar dengan pendengaran-Nya yang meliputi segala sesuatu, yang maha mengawasi memperhatikan semua makhluk dengan ilmu-Nya yang meliputi segala sesuatu.

Pengawasan Allah SWT sangat berbeda dengan pengawasan yang dijalankan oleh umatnya. Sebab secara umum pengawasan tersebut dibagi menjadi dua yaitu : pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Kedua pengawasan tersebut memiliki tata prosedur yang berbeda, namun yang

lebih esensial adalah kedua pengawasan tersebut dilakukan oleh manusia dan sangat terbatas oleh waktu.

Jika dibandingkan dengan pengawasan Allah kepada hambanya atau manusia tentu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya setiap gerak gerik, perbuatan pola fikir, tingkah laku akan diawasi oleh Allah SWT karena ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi dalam hal ini jika dihubungkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh manusia sangat jauh berbeda karena pengawasan yang dilakukan oleh manusia hanya pada saat bekerja yang dibatasi oleh ruang dan waktu sementara pengawasan yang dilakukan oleh Allah SWT tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

## **2.7 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan**

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mempunyai tugas untuk mewujudkan masyarakat pertanian yang mandiri dan sejahtera melalui pembangunan pertanian berbasis sumberdaya lokal dan berorientasi agribisnis serta berwawasan lingkungan.

Kebijakan pembangunan bidang pertanian adalah untuk memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian rakyat di pedesaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan komoditas sub bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

**Tabel 2.I.**  
**Jumlah dan Klasifikasi Kelompok Tani di Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2011**

No	Kecamatan	Jumlah			Kelas			
		Gapo ktan	Klpk Tani	Anggo ta (org)	1	2	3	4
1	Keritang	33	198	4.713	185	13	2	-
2	Rete	17	105	3.820	56	40	8	1
3	Enok	9	87	1.890	71	15	1	-
4	Tanah Merah	8	50	2.036	8	29	11	2
5	Kuindra	7	43	767	28	15	-	-
6	Tembilahan	5	56	1.806	46	7	3	-
7	Tempuling	10	78	2.672	74	4	-	-
8	Batang Tuaka	15	104	2.444	25	65	14	-
9	Gaung Anak Serka	8	60	1.340	54	5	1	-
10	Gaung	9	61	1.531	25	27	9	-
11	Mandah	4	50	979	27	15	8	-
12	Kateman	4	41	1.098	41	-	-	-
13	Kemuning	22	147	1.514	146	1	-	-
14	Tembilahan Hulu	3	55	1.488	46	9	-	-
15	Pulau Burung	5	72	2.202	68	3	1	-
16	Pelangiran	13	39	1.032	32	5	2	-
17	Teluk Belengkong	7	104	2.145	103	1	-	-
18	Concong	4	22	435	22	-	-	-
19	Kempas	5	85	2.849	26	47	10	2
20	Sungai Batang	8	38	2.174	22	15	1	-
<b>Jumlah</b>		<b>196</b>	<b>1.495</b>	<b>38.935</b>	<b>1.103</b>	<b>316</b>	<b>71</b>	<b>5</b>

**Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan  
Kabupaten Indragiri Hilir 2011**

Kelompok tani ini dikelompokkan menjadi beberapa kelas kelompok, pengelompokan ini melalui pengukuhan kelompok berdasarkan tingkat kedinamisannya. Pengukuhan kelompok tani merupakan proses pembinaan untuk mengetahui kemampuan kelompok yang berturut-turut terdiri dari kelas pemula, lanjut, madya dan utama. Kelas kelompok tani terbanyak yang ada

dikabupaten Indragiri Hilir masih kelas pemula yaitu 1.103 kelompok hanya 5 kelompok yang memiliki klasifikasi kelas utama.

Menindak lanjuti hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan suatu pengawasan yang terdapatnya suatu penyuluhan dan pembinaan yang langsung diberikan kepada petani dilokasi. Misi penyuluhan ini menjadi tanggung jawab kepada UPT penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan di masing-masing kecamatan seangkan untuk koordinasi di Kabupaten. Kegiatan penyuluhan menjadi tanggung jawab kelompok jabatan Fungsional yang berkedudukan pada badan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan (BP2KP) Kabupaten Indragiri Hilir. Jumlah penyuluh pertanian lapangan yang ada di desa masing-masing kecamatan bisa dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2**

**Jumlah desa dan penyuluh pertanian lapangan (PPL) di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2011**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	PPL		Jumlah (Orang)
			PNS/CPNS	Non PNS/THL TB PP	
1	Kritang	17	14	5	19
2	Reteh	14	10	1	11
3	Enok	14	8	-	8
4	Tanah Merah	10	5		5
5	Kuindra	8	1	2	3
6	Tembilahan	8	41	1	42
7	Tempuling	9	19	-	19
8	Batang Tuaka	13	14	1	15
9	GAS	12	9	-	9
10	Gaung	16	3	5	8
11	Mandah	17	1	-	1
12	Kateman	11	3	-	3
13	Kemunig	12	11	1	12
14	Tbh. Hulu	6	9	1	10

15	Pulau Burung	14	2	-	2
16	Pelangiran	16	1	-	1
17	Tlk. Belengkong	13	1	-	1
18	Concong	6	-	-	-
19	Kempas	12	19	1	20
20	Sungai Batang	8	1	4	5
	<b>Jumlah</b>	<b>236</b>	<b>172</b>	<b>22</b>	<b>194</b>

*Sumber : Badan Pelaksana Penyuluhan dan kelahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir 2011*

Catur sarana sangat penting untuk memenuhi dan melayani kebutuhan petani seperti perkreditan, sarana produksi dan kemudahan lainnya dalam pemasaran hasil produksi.

Tingkat penerapan panca usaha tani yang terdiri dari pemakaian bibit unggul, cara bercocok tanam, pengairan, pemupukan dan pengendalian hama penyakit sangat berpengaruh dalam upaya untuk meningkatkan produksi melalui peningkatan produktivitas atau komoditi.

## 2.8 Hipotesis

Iskandar (2008:175) Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang hendak dicari solusi pecahan melalui penelitian, yang dirumuskan atas dasar pengetahuan, pengalaman dan logika yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang hendak dilakukan. Berdasarkan latar belakang diatas serta dihubungkan dengan teori-teori yang relevan, maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut :

diduga pengawasan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan belum Efektif.

## 2.9 Konsep Operasional

Untuk mempermudah penganalisaan dan menghindari salah pengertian serta pemahaman istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini. maka pada penelitian ini penulis mengangkat pendapat pengawasan dari Manullang (2002: 184). Untuk melaksanakan pengawasan dalam upaya merealisasikan tujuan haruslah melalui suatu proses atau langkah-langkah yaitu terdiri dari tiga fese, diantaranya sebagai berikut:

1. Menetapkan alat ukur atau standar, yaitu :
  - a. Adanya pembagian tugas secara jelas.
  - b. Adanya waktu pencapaian tujuan.
  - c. Adanya biaya untuk pencapaian tujuan.
2. Melakukan tindakan penilain atau evalusi, dapat dilakukan dengan cara seperti :
  - c. laporan tertulis dari pada pegawai baik rutin maupun istimewa.
  - d. Melakukan kunjungan langsung.
  - e. mengamati hasil kerja.
3. Melakukan tindakan perbaikan yaitu yang diambil untuk menyesuaikan pekerjaan yang senyatanya menyimpang agar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. adapun tindakan perbaikan yang dilakukan adalah
  - a. Memberi teguran.
  - b. Memberikan peringatan
  - c. Melakukan perbaikan atas terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam mencari jalan keluar.

## 2.10 Variabel Penelitian

Manullang (2002:184) Untuk melaksanakan pengawasan dalam upaya merealisasikan tujuan haruslah melalui suatu proses atau langkah-langkahnya sebagai berikut:

**Tabel 2.2. Variabel Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub indikator</b>
Efektivitas Pengawasan	1. Menetapkan alat ukur atau standar.	a. Adanya pembagian tugas secara jelas. b. Adanya waktu pencapaian tujuan. c. Adanya biaya untuk pencapaian tujuan
	2. Melakukan tindakan penilain atau evaluasi.	a. laporan tertulis dari pada pegawai baik rutin maupun istimewa. b. Melakukan kunjungan langsung. c. mengamati hasil kerja.
	3. Melakukan tindakan perbaikan	a. Memberi teguran dan peringatan b. Melakukan perbaikan atas terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam mencari jalan keluar.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini penulis akan lakukan pada tahun 2012 sampai selesai. Dimana penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir di Jalan Pangeran Diponegoro Tembilahan.

#### **3.2 Jenis Data dan Sumber Data**

Adapun jenis data dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Husein Umar (2004:99) Data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu maupun perorangan seperti hasil pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh sipeneliti.

b. Data sekunder

Husein Umar (2004:99) data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya Data yang berasal dari laporan-laporan maupun literature yang dibutuhkan dalam penelitian ini.



### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono :2007:90).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi (Sugiyono :2007:91).

Adapun populasi dan sampel terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu :

#### 1. Populasi dan Sampel dari Dinas

Adapun yang menjadi populasi dari Dinas yaitu Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian yang berjumlah 2 (dua) orang dan teknik pengambilan sampelnya yaitu dengan sampling jenuh dimana keseluruhan populasi dijadikan sampel dalam penelitian. Sampel dari Sub bagian Perencanaan dan Pengendalian dijadikan sebagai *key Informan* bagi penulis dalam melaksanakan penelitian.

#### 2. Populasi dan Sampel dari Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Kecamatan Tembilahan

Adapun yang menjadi populasi dari masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani yaitu 1.806 orang dan sampel dari masyarakat diambil dengan menggunakan teori Slovin, jumlah sampel diketahui dengan menggunakan rumus Slovin (Dalam Umar, 2004:146) yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1806}{1 + 1806(10\%)^2}$$

$$n = \frac{1806}{1 + 1806(0.01)}$$

$$n = \frac{1806}{19,06}$$

$$n = 94,75$$

$$n = 95$$

Keterangan :  $n$  = Jumlah Sampel

$N$  = Jumlah Populasi

$e$  = Error 10% (Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel).

Jadi, dari hitungan jumlah populasi dari masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani sebanyak 1.806 Orang, dengan kelonggaran 10%, maka hasil penghitungan dengan menggunakan rumus Slovin tersebut didapat sampel sebanyak 94,75 yang dibulatkan menjadi 95 orang. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan metode *Random sampling* yaitu pengambilan sample yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.

Untuk lebih jelasnya, penetapan jumlah populasi dan sampel dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Penetapan Populasi dan Sampel**

No	Sub Populasi (Orang)	Populasi (Orang)	Sampel (Orang)
1	Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian	2	2
2	Anggota Kelompok Tani	1.806	95
<b>Jumlah</b>		1.808	97

*Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir 20011*

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

#### a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peneliti yang langsung melakukan pengamatan lapangan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan peneliti. Dalam melaksanakan Observasi ini peneliti melakukan pengamatan langsung lapangan untuk melihat keadaan secara nyata. Penulis melakukan pengamatan mengenai jenis-jenis produktivitas dari gabungan kelompok tani seperti : padi, buah-buahan dan sayur-sayuran. Tujuannya adalah untuk mengetahui efektifitas pengawasan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada responden seputar informasi yang diperlukandalam penelitian ini. Dalam wawancara peneliti meminta informasi kepada Key Informan yang terdiri dari beberapa pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dan masyarakat yang tergabung dengan kelompok tani kecamatan tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

c. Angket (Kuesioner)

Angket adalah pengumpulan data dengan mempergunakan daftar petanyaan yang disebarkan kepada responden mengenai bagaimana Efektifitas Pengawasan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan. Penulis mengajukan pertanyaan sesuai dengan indikator-indikator dalam penelitian ini.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Setelah peneliti mendapatkan data dan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan fenomena keadaan-keadaan yang ditemui dilapangan. Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Peneliti harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya, apakah analisis statistik ataukah analisis non –statistik. Pemilihan ini tergantung kepada jenis data yang dikumpulkan. Analisis

statistik sesuai dengan data kuantitatif atau data yang dikuantifikasikan, yaitu data dalam bentuk bilangan, sedang analisis nonstatistik sesuai untuk data deskriptif atau data textular. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya, dan karena itu analisis macam ini juga disebut dengan analisis isi. (Sumadi Suryabrata, 2011:40)

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN**

#### **4.1 Letak Geografis**

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan bagian dari Propinsi Riau terletak disebelah Tenggara, dengan luas wilayah mencapai  $\pm 11.607,97 \text{ KM}^2$ . Secara geografis wilayah ini terletak pada posisi  $102^{\circ} 32' 59'' - 104^{\circ} 17' 13''$  Bujur Timur dan  $0^{\circ} 32' 51''$  Lintang Utara –  $1^{\circ} 07' 17''$  Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dibatasi oleh :

- Kabupaten Pelalawan disebelah Utara
- Kabupaten Kepulauan Riau disebelah Timur
- Kabupaten Tanjung Jabung Propinsi Jambi disebelah Selatan
- Kabupaten Indragiri Hulu disebelah Barat.

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian dibawah 500 meter diatas permukaan laut ( dpl ) atau daerah pesisir timur merupakan daerah rawa ( gambut ) yang beriklim tropis basah. Jumlah curah hujan rata – rata perbulan 156 mm dengan jumlah hari hujan 8 hari, terbesar terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Desember. Daerah ini keberadaannya dekat dengan khatulistiwa sehingga suhu udara relatif panas. Kondisi yang sedemikian itu mengakibatkan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah rawan bencana alam, kebakaran, disamping adanya faktor penyebab lain seperti prilaku masyarakat dan umumnya rumah penduduk terbuat dari kayu.

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah yang banyak memiliki sungai, baik besar maupun kecil yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Sungai ini dapat berfungsi sebagai prasarana transportasi bagi masyarakat, disamping penyebab yang menjadikan daerah rawan bencana alam (longsor atau erosi pantai ).

#### **4.2 Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) No. 12 Tahun 2010, tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, untuk Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas membawahkan :
  - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
  - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian.
3. Unsur Pelaksana terdiri dari :
  - a. Kepala Bidang Pengolahan Lahan dan Air, membawahkan :
    1. Kepala Seksi Pengelolaan Air.
    2. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan.
    3. Kepala Seksi Perluasan Areal.

- b. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahkan:
  - 1. Kepala Seksi pengembangan Usaha
  - 2. Kepala Seksi Penanganan Pasca panen dan Pengolahan Hasil
  - 3. Kepala Seksi Promosi, Pemasaran dan Informasi Pasar
- c. Kepala Bidang Peternakan, membawahkan :
  - 1. Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
  - 2. Kepala Seksi Produksi Peternakan
  - 3. Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan:
  - 1. Kepala Seksi Pengembangan Tanaman Pangan
  - 2. Kepala Seksi Pengembangan Hortikultura
  - 3. Kepala Seksi Perlindungan Tanaman
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **4.3 Visi dan Misi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir**

Dalam visi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir secara jelas tercantum bahwa Kabupaten Indragiri Hilir akan mewujudkan daya saing dengan memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah. Dengan demikian jelas bahwa sektor pertanian merupakan sektor penting dalam rangka mewujudkan misi pembangunan Kabupaten indragiri hilir.



Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten indragiri hilir dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

**a. Visi :**

Terwujudnya masyarakat pertanian yang mandiri dan sejahtera melalui pembangunan pertanian berbasis sumberdaya lokal dan berorientasi agribisnis serta berwawasan lingkungan ”

**b. Misi :**

Adapun Misi dinas tanaman pangan hortikultural dan peternakan kabupaten Indragiri hilir adalah sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara produktif, efektif, dan efisien untuk menjamin kesediaan pangan
- 2) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam penerapan teknologi guna menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan berdaya saing tinggi
- 3) Memfasilitasi terwujudnya ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan
- 4) Mewujudkan pengelolaan dan pelayanan yang profesional dalam melindungi dan mempertahankan kelestarian sumber daya pertanian dan lingkungan hidup.

Pelaksanaan visi dan misi tersebut tentunya tidak terlepas dari kebijaksanaan nasional, regional maupun daerah dengan berpijak pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten

Indragiri Hilir. Sebagai Dinas teknis milik daerah maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan harus selalu dekat dengan masyarakat tani dan tugas pokoknya bermuara pada peningkatan yang dilaksanakan dengan berpedoman program pertanian.

#### **4.4 Tujuan Pembangunan Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan Kabupaten Indragiri Hilir**

Tujuan Pembangunan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten indragiri Hilir sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian secara Nasional yaitu

1. Meningkatkan taraf hidup dan Kesejahteraan petani.
2. Memenuhi Kebutuhan pangan.
3. Menciptakan Lapangan Kerja.
4. Menciptakan Keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya alam.
5. Menumbuhkan agribisnis berskala ekonomi melalui pengembangan sentra produksi.
6. Meningkatkan mutu gizi melalui penganekaragaman jenis pangan.

#### **4.5 Sasaran Pembangunan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir**

Sasaran dari Pembangunan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Ketersediaan bahan baku pangan asal pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indragiri Hilir.
2. Terwujudnya usaha agribisnis yang tangguh dengan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan berdaya saing
3. Tersedianya infrastruktur dibidang pertanian yang fungsional dengan sumberdaya manusia yang tangguh dan profesional didalam melestarikan sumberdaya pertanian dan lingkungan hidup.

#### **4.6 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir**

##### **I. KEPALA DINAS**

- (1) Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantu.
- (2) Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyanggarkan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang usaha tanaman pangan hortikultura peternakan pengelolaan lahan dan air serta pengolahan dan pemasaran hasil.
  - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Pengelolaan Lahan dan Air serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Usaha Tanaman Pangan Hortikultura, Peternakan .Pengelolaan Lahan dan Air Serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
- d. Pembinaan Administrasi dan Aparatur dilingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

## **II. SEKRETARIS**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Lingkup kesekretariatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan Program dan kegiatan kesekretariatan ;
  - b. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang-bidang
  - c. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang
  - d. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan bidang-bidang
  - e. Pelaksanaan pelayanan Administrasi Kesekretariatan yang meliputi Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, dan Perlengkapan , serta Perencanaan dan Pengendalian
  - f. Pembinaan, Monitoring Evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan
  - g. Penyusunan pengoordinasian pelaporan yang meliputi laporan kerja dinas , laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan kegiatan Dinas

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan ,surat menyurat,keterlaksanaan , kearsipan dan kepustakaan;
  - c. Penyelenggaraan urusan rumah tangga,protocol ,perjalanan dinas dan kehumasan;
  - d. Pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi absensi dan pengelolaan data kepegawaian dan pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan**

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup keuangan dan perlengkapan

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1),

Kepala Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- b. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan
- c. Penatausahaan Keuangan dan Perlengkapan
- d. Penyusunan laporan Keuangan dan Perlengkapan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya

### **3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian**

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup Perencanaan dan Pengendalian

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Sub bagian Perencanaan dan Pengendalian
- b. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- c. Pengkoordinasian Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang-bidang

- d. Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang
- e. Penyusunan dan pengoodinasian pelaporan yang meliputi laporan kinerja dinas, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **III. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan lingkup Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura lingkup Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perlindungan Tanaman
  - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura lingkup usaha tanaman pangan, hortikultura dan perlindungan tanaman

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perlindungan Tanaman
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

### **1. Kepala Seksi Tanaman Pangan**

- (1) Kepala seksi tanaman pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Lingkup Tanaman Hortikultura
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala seksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Seksi Tanaman Pangan lingkup Pengembangan Usaha, Peningkatan Intensitas Pertanaman, dan Deversifikasi Usaha Tanaman Pangan
  - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Seksi Tanaman Pangan Lingkup Pengembangan Usaha, Peningkatan Intensitas Pertanaman dan Divensifikasi Usaha Tanaman Pangan
  - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Pengembangan Usaha, Peningkatan Intensitas Pertanaman dan Divensifikasi Usaha Tanaman Pangan
  - d. Pembinaan dan Pengawasan Lingkup Pengembangan Usaha, Peningkatan Intensitas Pertanaman dan Divensifikasi Usaha Tanaman Pangan



- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya

## **2. Kepala Seksi Hortikultura**

- (1) Kepala Seksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Lingkup Tanaman Hortikultura
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Hortikultura mempunyai fungsi
  - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Seksi Hortikultura lingkup Pengembangan Usaha dan Peningkatan Produksi, serta Deversifikasi Usaha Tanaman Hortikultura
  - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi Hortikultura lingkup Pengembangan Usaha dan Peningkatan Produksi, serta Deversifikasi Usaha Tanaman Hortikultura
  - c. Penyiapan bahan Perumusan Kebijakan Lingkup Pengembangan Usaha dan Peningkatan Produksi, serta Deversifikasi Usaha Tanaman Hortikultura
  - d. Pembinaan dan pengawasan pada seksi Hortikultura Lingkup Pengembangan Usaha dan peningkatan produksi, serta Deversifikasi Usaha Tanaman Hortikultura
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **3. Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura**

- (1) Kepala seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Lingkup Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
  - a. Panyusunan rencana program dan kegiatan pada Seksi Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura lingkup Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan hama penyakit dan penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura
  - b. Panyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura lingkup Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan hama penyakit dan penyakit Tanaman Pangan Dan Hortikultura
  - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan hama penyakit dan penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura
  - d. Pembinaan dan Pengawasan pada seksi Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura lingkup Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan hama penyakit dan penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya

#### **IV. KEPALA BIDANG PETERNAKAN**

- (1) Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan lingkup Tanaman Peternakan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala bidang peternakan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan padan bidang Peternakan lingkup Penyebaran, Pengembangan dan Peningkatan Produksi serta pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
  - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan padan bidang peternakan lingkup penyebaran, pengembangan dan peningkatan produksi serta pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
  - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Penyebaran, Pengembangan dan Peningkatan Produksi serta Pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **1. Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan**

- (1) Kepala seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan lingkup Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala seksi penyebaran dan pengembangan peternakan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi penyebaran dan pengembangan peternakan lingkup penyebaran dan pengembangan usaha ternak unggas, ternak kecil dan ternak besar serta aneka ternak
  - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi penyebaran dan pengembangan peternakan lingkup penyebaran dan pengembangan usaha ternak unggas, ternak kecil dan ternak besar serta aneka ternak
  - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup penyebaran dan pengembangan usaha ternak unggas, ternak kecil dan ternak besar serta aneka ternak
  - d. Pembinaan dan pengawasan lingkup penyebaran dan pengembangan usaha ternak unggas, ternak kecil dan ternak besar serta aneka ternak
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya

## **2. Kepala Seksi Produksi Peternakan**

- (1) Kepala seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala bidang peternakan lingkup produksi peternakan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala seksi dan produksi Peternakan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi produksi peternakan lingkup peningkatan produksi usaha peternakan
  - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi produksi peternakan lingkup peningkatan produksi usaha peternakan
  - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup produksi peternakan
  - d. Pembinaan dan pengawasan lingkup produksi peternakan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya

## **3. Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner**

- (1) Kepala seksi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang peternakan lingkup kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala seksi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner lingkup pencegahan, pengendalian dan penanggulangan gangguan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner lingkup pencegahan, pengendalian dan penanggulangan gangguan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
- d. Pembinaan dan pengawasan lingkup kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya

## **V. KEPALA BIDANG PENGOLAHAN LAHAN DAN AIR**

- (1) Kepala Bidang Pengolahan Lahan Dan Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Lingkup Pengolahan Lahan Dan Air
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bidang Pengolahan Lahan dan Air mempunyai fungsi ;
  - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pengolahan Lahan dan Air lingkup Pengelolaan Lahan, Pengelolaan Air, dan Pengelolaan Areal.

- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada bidang pengolahan lahan dan air lingkup pengelolaan lahan, pengelolaan air, dan pengelolaan areal
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada bidang pengolahan lahan dan air lingkup pengelolaan lahan, pengelolaan air, dan pengelolaan areal
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **1. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan**

- (1) Kepala seksi Pengolahan Lahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang Pengolahan Lahan Dan air lingkup pengelolaan lahan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala seksi Pengolahan Lahan mempunyai fungsi ;
  - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi pengelolaan lahan lingkup pengelolaan lahan usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan serta mekanisasi pertanian pra panen
  - b. Menyelenggarakan program dan kegiatan pada seksi pengelolaan lahan lingkup pengelolaan lahan usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan serta mekanisasi pertanian pra panen

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada seksi pengelolaan lahan lingkup pengelolaan lahan usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan serta mekanisasi pertanian pra panen
- d. Pembinaan dan pengawasan teknis pada seksi pengelolaan lahan lingkup pengelolaan lahan usaha tanaman pangan, hortikultura dan peternakan serta mekanisasi pertanian pra panen
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **2. Kepala Seksi Pengelolaan Air**

- (1) Kepala seksi Pengolahan air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang Pengolahan Lahan Dan air lingkup pengelolaan air
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala seksi Pengolahan air mempunyai fungsi ;
  - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi pengelolaan air lingkup pengelolaan air usaha tanaman pangan, hortikultura.
  - b. Menyelenggarakan program dan kegiatan pada seksi pengelolaan air lingkup pengelolaan air usaha tanaman pangan, hortikultura.



- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada seksi pengelolaan air lingkup pengelolaan air usaha tanaman pangan, hortikultura.
- d. Pembinaan dan pengawasan teknis pada seksi pengelolaan air lingkup pengelolaan air usaha tanaman pangan, hortikultura
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **3. Kepala Seksi Perluasan Areal**

- (1) Kepala seksi Perluasan areal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang Pengolahan Lahan dan air lingkup perluasan areal
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala seksi perluasan areal mempunyai fungsi ;
  - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi perluasan areal lingkup perluasan areal usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
  - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi perluasan areal lingkup perluasan areal usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
  - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada seksi perluasan areal lingkup perluasan areal usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

- d. Pembinaan dan pengawasan teknis pada seksi perluasan areal lingkup perluasan areal usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya

## **VI. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL**

(1) Kepala Bidang Pengolahan dan pemasaran hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Lingkup Pengolahan dan pemasaran hasil

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1),

Kepala Bidang Pengolahan dan pemasaran hasil mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang pengelolaan dan pemasaran hasil lingkup pengembangan usaha penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil serta promosi pemasaran dan informasi pasar.
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada bidang pengelolaan dan pemasaran hasil lingkup pengembangan usaha penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil serta promosi pemasaran dan informasi pasar.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pengelolaan dan pemasaran hasil.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **1. Kepala Seksi Penyebaran Usaha**

(1) Kepala seksi penyebaran usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pengelolaan dan pemasaran hasil

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1),

Kepala seksi penyebaran usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi pengembangan usaha lingkup pengkoordinasi pengembangan usaha sarta fasilitasi penyediaan permodalan dan / kreditan usaha Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perternakan.
- b. Penyelenggaraan program / kegiatan pada seksi pengembangan usaha lingkup pengkoordinasi pengembangan usaha sarta fasilitasi penyediaan permodalan dan / kreditan usaha Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perternakan.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pengembangan usaha
- d. Pembinaan dan pengawasan lingkup pengembangan usaha
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **2. Kepala Seksi Penangan Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil**

(1) Kepala seksi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pengelolaan dan Pemasaran hasil lingkup penanganan pasca panen dan

pengelolaan hasil Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1),

(2) Kepala Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pada seksi penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil lingkup pengembangan alat dan mesin pasca panen dan pengelolaan hasil serta diversifikasi olahan hasil produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil lingkup pengembangan alat dan mesin pasca panen dan pengelolaan hasil serta diversifikasi olahan hasil produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
- c. Penyiapan bahan perumusan teknis lingkup pengembangan alat dan mesin pasca panen dan pengelolaan hasil serta diversifikasi olahan hasil Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
- d. Pembinaan dan pengawasan lingkup pengembangan alat dan mesin pasca panen dan pengelolaan hasil serta diversifikasi olahan hasil produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

(3) Kepala seksi promosi dan informasi pasar

Kepala seksi promosi dan informasi pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala seksi kepala bidang pemasaran hasil lingkup promosi dan informasi pasar. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala seksi promosi dan informasi pasar mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan promosi, pemasaran dan informasi pasar lingkup pengkoordinasian pelaksanaan promosi, pemasaran , inventarisasi dan penyajian informasi ketersediaan serta kebutuhan hasil usaha tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi promosi, pemasaran dan informasi pasar lingkup pengkoordinasian pelaksanaan promosi, pemasaran , inventarisasi dan penyajian informasi ketersediaan serta kebutuhan hasil usaha tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup promosi, pemasaran dan informasi pasar inventarisasi dan penyajian informasi ketersediaan serta kebutuhan hasil usaha tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

- d. Pembinaan dan pengawawasan pelaksanaan promosi, pemasaran dan informasi pasar.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Identitas Responden

Identitas responden dari penelitian Analisis Efektivitas Pengawasan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan yang berjumlah 97 orang yaitu 95 sebagai responden dari masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani dan 2 orang dari pegawai dinas yang dijadikan sebagai key informan, dan selanjutnya penulis mengklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan. Untuk melihat kategori responden dapat dilihat pada tabel berikut ini.

##### a. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini merupakan data responden yang ditinjau dari jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Data ini di buat untuk melihat perbandingan antara jumlah responden laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1**  
**Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	60	63,2%
2	Perempuan	35	36,8%
<b>Jumlah</b>		<b>95 Orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel untuk responden sebanyak 95 orang, yang keseluruhannya terdiri dari 60 orang berjenis laki-laki dengan persentase 63,2%, dan berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 35 orang yaitu dengan persentase 36,8%. Jadi jumlah keseluruhan jumlah responden yang dijadikan sampel dari masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani di Kecamatan Tembilahan yaitu 95 orang.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden dari masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani adalah laki-laki yang berjumlah 60 orang yang kebanyakan merupakan kepala keluarga yang tergabung dalam kelompok tani di Kecamatan Tembilahan.

b. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Untuk mengetahui tingkat umur responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.2**  
**Identitas Responden Berdasarkan Umur**

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	20-25	5	5,3%
2	26-30	11	11,6%
3	31-35	10	10,6%
4	36-40	15	15,8%
5	41-45	18	18,9%
6	46-50	18	18,9%
7	Diatas >50	18	18,9%
<b>Jumlah</b>		<b>95 Orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*



Dari data diatas dapat dilihat bahwa identitas responden masyarakat berdasarkan umur sangat bervariasi yaitu umur diantara 20-25 tahun sebanyak 5 orang (5,3%), umur 26-30 tahun sebanyak 11 orang (11,6%), umur 31-35 tahun sebanyak 10 orang (10,6%), umur 36-40 tahun sebanyak 15 orang (15,8%), umur 41-45 tahun sebanyak 18 orang (18,9%), umur 46-50 tahun sebanyak 18 orang (18,9%), dan umur diatas 50 tahun sebanyak 18 orang (18,9%). Dan dapat disimpulkan bahwa identitas responden berdasarkan umur yang paling banyak yaitu antara umur 41 tahun keatas.

c. Identitas Reponden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan pendidikan terakhir yaitu sebagai berikut :

**Tabel 5.3**  
**Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Tamat SD	13	13,7%
2	SD	32	33,7%
3	SMP / Sederajat	31	32,6%
4	SLTA / Sederajat	19	20%
<b>Jumlah</b>		<b>95 Orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa identitas responden berdasarkan pendidikan terakhir yaitu tidak tamat SD sebanyak 13 orang (13,7%), tamat SD sebanyak 32 orang (33,7%), tamat SMP sederajat sebanyak 31 orang (32,6%), dan tamat SLTA sederajat sebanyak 19 orang (20%). Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

## **5.2. Efektivitas Pengawasan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan**

Pengawasan merupakan suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Fungsi pengawasan dalam manajemen merupakan upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikasi dari setiap penyimpangan tersebut serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Kegiatan pengawasan menghasilkan informasi tentang penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional yang terjadi. Informasi tersebut diperoleh dengan berbagai cara seperti laporan, hasil wawancara, penyebaran kuesioner dan pengamatan langsung oleh pengawas lapangan. Informasi tersebut berguna untuk meningkatkan kinerja seluruh komponen organisasi.

Jadi dapat dikatakan bahwa pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan organisasi, sebab pengawasan berupaya memberikan perbaikan atas setiap permasalahan-permasalahan

atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam sebuah organisasi yang bertujuan agar organisasi tersebut bisa berjalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pengawasan selalu meneliti atau mengecek apakah pekerjaan yang dilakukan tadi sudah sesuai dengan ketentuan sebelumnya atau belum.

Dari tabel penelitian membahas seluruh tanggapan responden yang berjumlah 95 responden dari masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani dan 2 responden dijadikan sebagai key informan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir. Sebelum peneliti membuat daftar pertanyaan beserta alternative jawaban yang diberikan kepada responden dan kemudian responden menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu peneliti melakukan observasi sebagai alat pemantau atau turun kelapangan terhadap kuesioner, sehingga diharapkan dari responden tidak menyimpang dari keadaan yang sebenarnya.

Untuk penulisan ini, adapun fokus penelitian ini adalah Efektivitas Pengawasan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan pada Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan.

- a. Menetapkan alat ukur atau standar
- b. Melakukan tindakan penilaian atau evaluasi
- c. Melakukan tindakan perbaikan

#### **a. Menetapkan Alat Ukur atau Standar**

Penetapan standar pelaksanaan mengandung arti sebagai satuan yang digunakan untuk mengukur standar setiap kegiatan yang dilakukan agar mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Penetapan alat ukur atau standar sangat penting dalam melakukan suatu pekerjaan agar pekerjaan tadi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Kemudian dibawah ini akan disajikan hasil penelitian penulis mengenai penetapan alat ukur atau standar pengawasan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan. Penetapan alat ukur atau standar bertujuan untuk mencapai efektivitas pengawasan yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pada Gabungan Kelompok Tani. Adapun indikator-indikator dari penetapan alat ukur atau standar pengawasan yaitu :

##### **1. Adanya Pembagian Tugas Secara Jelas**

Untuk mengetahui bagaimana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam menetapkan pembagian tugas secara jelas dalam melakukan pengawasan terhadap Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.4**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pembagian Tugas Secara Jelas yang**  
**dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan**  
**Kabupaten Indragiri Hilir pada gabungan kelompok Tani di**  
**Kecamatan Tembilahan**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	8	8,4%
2	Baik	59	62,1%
3	Kurang Baik	21	22,1%
4	Tidak Baik	7	7,4%
<b>Jumlah</b>		<b>95 Orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel 5.4 diatas, tanggapan responden terhadap pembagian tugas secara jelas yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan ini dapat dikategorikan “Baik” yaitu 59 orang (62,1%) dari total responden yang berjumlah 95 orang. Kemudian 8 orang (8,4%) menyatakan “Sangat Baik” yang artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan pembagian tugas secara jelas dalam hal pengawasan, 21 orang (22,1%) menyatakan “Kurang Baik” yang artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Kurang Baik dalam melakukan pembagian tugas dalam hal pengawasan, sedangkan sebanyak 7 orang (7,4%) menyatakan “Tidak Baik” dalam pembagian tugas secara jelas yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan.

Jadi, berdasarkan tabel diatas dapat dinyatakan bahwa dalam menetapkan alat ukur atau standar pengawasan terhadap Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir sudah membuat pembagian tugas secara jelas dan termasuk dalam kategori Baik.

Berdasarkan hasil observasi dilokasi penelitian, penulis melihat sudah adanya pembagian tugas pengawasan secara jelas yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini dibenarkan oleh salah satu pegawai dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yaitu Bapak Edri Novianto, S PKP, dalam wawancara dengan penulis mereka mengatakan :

“Pembagian tugas mengenai pengawasan sudah dilakukan dengan baik, seperti pembagian juga bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap kelompok tani seperti bagian pengembangan tanaman pangan, hortikultura, bagian pengelolaan lahan dan air maupun bagian pemasaran, dalam hal ini pegawai bertugas mengawasi petani agar tetap berkembang dengan baik dan laporan tersebut kemudian dirangkup oleh bagian perencanaan dan pengendalian, jadi dalam perencanaan dan pengendalian sudah terangkup mengenai hal pengawasan yang dilakukan oleh perbidang dalam hal pengembangan kelompok tani”.(wawancara, 26 Desember 2012)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat penulis ambil kesimpulan bahwa Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan pembagian tugas secara jelas agar pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat berkembang dengan baik.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden tentang mutu pengawasan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan terhadap Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan setelah adanya pembagian tugas secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.5**  
**Tanggapan Responden mengenai Mutu Pengawasan setelah adanya**  
**Pembagian Tugas Secara Jelas oleh Dinas Tanaman Pangan,**  
**Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	30	31,6%
2	Baik	26	27,4%
3	Kurang Baik	35	36,8%
4	Tidak Baik	4	4,2%
<b>Jumlah</b>		<b>95 Orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel 5.5 diatas dapat dilihat tanggapan responden mengenai mutu pengawasan dapat dikategorikan “Kurang Baik” yaitu 35 orang (36,8%) artinya mutu pengawasan setelah adanya pembagian tugas secara jelas yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dikategorikan Kurang Baik, yang menyatakan “Sangat Baik” berjumlah 30 orang (31,6%) artinya mutu pengawasan setelah adanya pembagian tugas secara jelas yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai mutu Sangat Baik, dan yang menyatakan “Baik” berjumlah 26 orang (27,4%) artinya mutu pengawasan setelah adanya pembagian tugas secara jelas dikategorikan Baik dan kemudian jumlah frekuensi terendah adalah “Tidak Baik” sebanyak 4 orang (4,2%) artinya

mutu pengawasan setelah adanya pembagian tugas secara jelas yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dikategorikan Tidak Baik.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan adanya pembagian tugas secara jelas akan tetapi setelah adanya pembagian tugas secara jelas tadi mempunyai mutu yang Kurang Baik, hal ini dikarenakan kurangnya efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan pada gabungan kelompok tani di Kecamatan Tembilahan sehingga dikategorikan “Kurang Baik”.

## 2. Adanya Waktu Pencapaian Tujuan

Dengan adanya penetapan waktu pencapaian tujuan, maka akan mempermudah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mencapai target pengawasan berdasarkan pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya adapun tujuan pengawasan dalam penetapan waktu yaitu untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan. Untuk mengetahui bagaimanakah penetapan waktu dalam pencapaian tujuan yang diberikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Gabungan Kelompok Tani untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura yaitu sebagai berikut :



**Tabel 5.6**  
**Tanggapan Responden Mengenai Penetapan Waktu Dalam**  
**Pencapaian Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan,**  
**Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir**

<b>No</b>	<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Sangat Baik	12	12,6%
2	Baik	44	46,3%
3	Kurang Baik	32	33,7%
4	Tidak Baik	7	7,4%
<b>Jumlah</b>		<b>95 Orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel 5.6 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai bagaimana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan waktu pencapaian tujuan dalam melakukan pengawasan terhadap Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan, responden yang menjawab “Sangat Baik” berjumlah 12 orang (12,6%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Sangat Baik dalam melakukan penetapan waktu pencapaian tujuan, yang menjawab “Baik” berjumlah 44 orang (46,3%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Baik dalam melakukan penetapan waktu pencapaian tujuan pada kelompok tani, dan yang menjawab “Kurang Baik” berjumlah 32 orang (33,7%) yang artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Kurang Baik dalam melakukan penetapan waktu pencapaian tujuan serta yang menjawab “Tidak Baik” sebanyak 7 orang (7,4%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tidak Baik dalam melakukan

penetapan waktu pencapaian tujuan pada Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan dalam hal melakukan pengawasan.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban dari responden didominasi dengan jawaban “Baik” yang artinya bahwa Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir sudah Baik dalam menetapkan waktu pencapaian tujuan dalam melakukan pengawasan terhadap Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan.

Setelah waktu pencapaian tujuan ditentukan, maka kita bisa melihat bagaimana ketepatan waktu yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam melakukan pengawasan terhadap Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.7**  
**Tanggapan Responden mengenai Ketepatan Waktu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Melakukan Pengawasan**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	4	4,2%
2	Baik	49	51,6%
3	Kurang Baik	31	32,6
4	Tidak Baik	11	11,6%
<b>Jumlah</b>		<b>95 Orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari data tabel 5.7 diatas dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai ketepatan waktu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam melakukan pengawasan pada gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilihan dan yang menjawab “Sangat Baik” berjumlah 4 orang (4,2%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Sangat Baik dalam ketepatan waktu dalam pencapaian tujuan, dan yang menjawab “Baik” sebanyak 49 orang (51,6%) yang artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir sudah Baik dalam melakukan ketepatan waktu pengawasan pada Kelompok Tani di Kecamatan Tembilihan, yang menjawab “Kurang Baik” sebanyak 31 orang (32,6%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Kurang Baik dalam ketepatan waktu pengawasan pada Kelompok Tani di Kecamatan Tembilihan dan yang menjawab “Tidak Baik” berjumlah 11 orang (11,6%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tidak Baik dalam hal ketepatan waktu pengawasan pada Kelompok Tani di Kecamatan Tembilihan.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden didominasi dengan jawaban Baik, artinya bahwa adanya ketepatan waktu yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal pengawasan.

Setelah ketepatan waktu, maka kita bisa melihat apakah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam melakukan pengawasan telah sesuai dengan waktu yang dibutuhkan oleh para petani di Kecamatan Tembilihan. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kesesuaian waktu yang dibutuhkan kelompok tani di kecamatan tembilihan adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.8**  
**Tanggapan Responden Mengenai Kesesuaian Waktu yang**  
**Dibutuhkan Kelompok Tani dalam Melakukan Pengawasan oleh**  
**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten**  
**Indragiri Hilir**

<b>No</b>	<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Sangat Baik	7	7,4%
2	Baik	42	44,2%
3	Kurang Baik	41	43,1%
4	Tidak Baik	5	5,3%
<b>Jumlah</b>		<b>95 Orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel 5.8 diatas dapat dilihat jawaban responden mengenai kesesuaian waktu yang dibutuhkan petani dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dengan jawaban “Sangat Baik” berjumlah 7 orang (7,4%) yang artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Sangat Baik mengenai kesesuaian waktu yang dibutuhkan Kelompok Tani dalam melakukan pengawasan, yang menjawab “Baik” sebanyak 42 orang (44,2%) yang artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir telah Baik dalam hal kesesuaian waktu melakukan pengawasan pada Kelompok Tani di Kecamatan

Tembilahan, yang menjawab “Kurang Baik” sebanyak 41 orang (43,1%) yang artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Kurang Baik dalam hal kesesuaian waktu melakukan pengawasan pada Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahn dan yang menjawab “Tidak Baik” sebanyak 5 orang (5,3%) yang artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir belum ada kesesuaian waktu dalam melakukan pengawasan pada Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan.

Dari jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden didominasi dengan jawaban Baik, yang artinya adanya kesesuaian waktu yang dibutuhkan para petani di Kecamatan Tembilahan dalam hal melakukan pengawasan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

### 3. Adanya Biaya Untuk Pencapaian Tujuan

Setelah adanya penetapan standar waktu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, tentu tidak terlepas dengan biaya untuk mencapai suatu tujuan organisasi tersebut. Dalam melakukan suatu pekerjaan tidak akan maksimal tanpa adanya biaya.

Adapun realisasi fisik dan keuangan belanja langsung APBD Kabupaten pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2011 yaitu :

**Tabel 5.9**  
**Realisasi Fisik dan Anggaran Belanja Langsung APBD Kabupaten pada**  
**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten**  
**Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2011**

No	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Volu me Kegia tan	Realis asi Fisik (%)	Realisasi Anggaran	
					%	Rp
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b> - Pengendalian Keamanan Lingkungan	8.000.000	8 Bulan	100	100	8.000.000
<b>B</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik - Penyediaan alat tulis dan kantor - Penyediaan barang cetakan - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman	63.000.000  33.213.000 11.448.000 237.400.000 24.520.000 37.260.000	1 Tahun  1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	100  100 100 100 100	86.96  100 100 99.69 100	54.785.597  33.213.000 11.448.000 236.664.000 24.520.000 37.260.000

	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	281.832.000	1 Tahun	100	99.92	281.599.000
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	209.340.000	1 Tahun	100	99.95	209.231.500
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	37.650.000	2 Unit	100	89.91	33.850.000
	- Pemeliharaan Rutin/berkala gedung	144.155.000	1 Tahun	100	99.94	144.075.000
	- Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan	30.000.000	1 Tahun	100	100	30.000.000
	- Biaya Pemeliharaan Rutin	27.600.000	1 Tahun	100	100	27.600.000
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					
	- Pendidikan dan pelatihan Formal	62.000.000	1 Tahun	100	99.40	61.630.000
<b>E</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					

	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	93.310.000	1 Tahun	100	99.73	93.057.500
<b>F</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b> - Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	531.000.000	1 Tahun	100	99.91	530.533.000
<b>G</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b> - Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah - Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian - Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan - Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija - Pengembangan pertanian	61.009.000  100.000.000  123.350.000  100.000.000  241.650.000	30 Orang  1 Tahun  200 KK  50 Ha  1 Paket	100  100  100  100	100  99.37  99.18  95.37  98.83	61.009.000  99.371.000  122.333.000  95.371.500  238.823.000



	pada lahan kering					
	- Pengembangan perbenihan dan pembibitan	126.000.000	34 Ha	100	93.01	117.196.000
	- Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan	393.498.000	1 Tahun	100	98.42	387.275.500
	- Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian	350.000.000	2 Paket	100	66.65	233.257.500
	- Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	2.313.000.000	2000 Ha	100	74.06	1.713.024.500
	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	25.000.000	1 Tahun	100	98.17	24.542.000
<b>H</b>	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</b>					
	- Promosi atas hasil produksi pertanian	526.000.000	1 Tahun	100	99.83	525.081.500
	- Pengolahan informasi permintaan pasar	250.000.000	1 Tahun	100	99.25	248.120.000
	- Penyuluhan distribusi pemasaran	149.000.000	1 Tahun	100	99.15	147.739.500
<b>I</b>	<b>Program</b>					

	<b>Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian dan perkebunan</li> <li>- Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian dan perkebunan</li> <li>- Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan</li> <li>- Monitoring, evaluasi dan pelaporan</li> </ul>	897.400.000     925.640.000     100.000.000     20.025.000	30 Ha     17 Unit     1 Tahun     1 Tahun	100     100     100     100	72.42     96.16     98.41     99.72	649.935.500     890.102.000     98.414.500     19.969.000
<b>J</b>	<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan peningkatan produksi pertanian dan perkebunan</li> <li>- Penyediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan</li> </ul>	375.500.000     165.500.000	1 Tahun     2 Unit	99.8     100	98.99     99.21	371.708.000     164.193.500
<b>K</b>	<b>Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan</b>					

	<b>Lapangan</b> - Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	245.000.000	1 Tahun	95.4	91.40	223.918.500
<b>L</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b> - Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	150.000.000	1 Tahun	100	99.39	149.088.500
<b>M</b>	<b>Program peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b> - Pembibitan dan perawatan ternak - Pendistribudisan bibit ternak pada masyarakat - Monitoring, evaluasi dan pelaporan	154.200.000  1.428.000.000  15.000.000	1 Tahun  2620 Ekor  1 Tahun	100  100  100	85.95  98.13  95.07	132.538.000  1.401.297.000  14.260.500
<b>N</b>	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</b> - Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan	75.000.000	25 Orang	100	100	75.000.000
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>11.141.500.000</b>			<b>89.94</b>	<b>10.021.035.597</b>

<b>Langsung</b>					
-----------------	--	--	--	--	--

***Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir 2011***

Dari tabel 5.9 diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah sangat banyak dengan realisasi 89,94%. Dapat disimpulkan bahwa Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir telah mendapatkan anggaran yang cukup memadai dalam melakukan program-program yang telah direncanakan sebelumnya agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya bisa tercapai semaksimal mungkin.

Untuk mengetahui bagaimanakah biaya yang diberikan dari pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan kepada Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.10**  
**Tanggapan Responden mengenai Biaya (Anggaran) yang diberikan Pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Kelompok Tani**

<b>No</b>	<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Sangat Baik	12	12,6%
2	Baik	50	52,6%
3	Kurang Baik	31	32,6%
4	Tidak Baik	2	2,2%
<b>Jumlah</b>		<b>95 Orang</b>	<b>100%</b>

***Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012***

Dari tabel 5.10 diatas dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai anggaran yang diberikan pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan untuk pengembangan Kelompok Tani

yaitu responden yang menjawab “Sangat Baik” berjumlah 12 orang (12,6%) artinya biaya yang diberikan melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahn sudah Sangat Baik, serta yang menjawab “Baik” Sebanyak 50 orang (52,6%) yang artinya anggaran yang diberikan sudah Baik untuk pengembangan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan, yang menjawab “Kurang Baik” sebanyak 31 orang (32,6%) yang artinya anggaran yang diberikan melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Kurang Baik, dan yang menjawab dengan jawaban “Tidak Baik” sebanyak 2 orang (2,2%) yang artinya anggaran yang diberikan melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dikatakan Tidak Baik.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat dari jawaban responden yaitu didominasi dengan jawaban Baik, artinya terdapatnya anggaran atau bantuan dari pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengembangan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden tentang transparansi atau kejelasan anggaran yang diberikan Pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan yaitu sebagai berikut :

**Tabel 5.11**  
**Tanggapan Responden mengenai transparansi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Kelompok Tani**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	10	10,5%
2	Baik	41	43,2%
3	Kurang Baik	36	37,9%
4	Tidak Baik	8	8,4%
<b>Jumlah</b>		<b>95 Orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel 5.11 diatas dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai transparansi anggaran yang diberikan Pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Kelompok Tani. Adapun jawaban dari responden dengan jawaban “Sangat Baik” sebanyak 10 orang (10,5%) yang artinya adanya transparansi anggaran yang diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir yang dikategorikan Sangat Baik, yang menjawab “Baik” sebanyak 41 orang (43,2%) yang artinya Transparansi anggaran yang diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir

sudah berjalan dengan Baik, serta yang menjawab “Kurang Baik” 36 orang (37,9%) yang artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Kurang Transparan dalam hal anggaran yang diberikan oleh Pemerintah, dan yang menjawab “Tidak Baik” berjumlah 8 orang (8,4%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir tidak transparan dalam memberikan anggaran pada Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari jawaban responden didominasi dengan jawaban Baik, artinya bahwa adanya transparansi anggaran yang berasal dari Pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengembangan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan.

Kemudian, untuk mengetahui rekapitulasi jawaban responden mengenai indikator variabel penetapan alat ukur atau standar pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 5.12**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Menetapkan**  
**Alat Ukur atau Standar Pengawasan yang dilakukan Dinas Tanaman**  
**Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada**  
**Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan**

No	Indikator Pengukuran	Klasifikasi Tanggapan Responden				
		Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	Jumlah
1	Adanya Pembagian Tugas Secara Jelas	8 (8,4%)	59 (62,1%)	21 (22,1%)	7 (7,4%)	95
2	Mutu Pengawasan Setelah Adanya Pembagian Tugas Secara Jelas	30 (31,6%)	26 (27,4%)	35 (36,8%)	4 (4,2%)	95
3	Adanya Waktu Pencapaian Tujuan	12 (12,6%)	44 (46,3%)	32 (33,7%)	7 (7,4%)	95
4	Ketepatan Waktu dalam Melakukan Pengawasan	4 (4,2%)	49 (51,6%)	31 (32,6%)	11 (11,6%)	95
5	Kesesuaian Waktu yang dibutuhkan Kelompok Tani dalam melakukan Pengawasan	7 (7,4%)	42 (44,2%)	41 (43,1%)	5 (5,3%)	95
6	Adanya Biaya untuk Pencapaian Tujuan	12 (12,6%)	50 (52,6%)	31 (32,6%)	2 (2,2%)	95
7	Transparansi Anggaran yang diberikan Dinas	10 (10,5%)	41 (43,2%)	36 (37,9%)	8 (8,4%)	95
<b>Jumlah</b>		<b>83</b>	<b>311</b>	<b>227</b>	<b>44</b>	<b>665</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>11,86</b>	<b>44,43</b>	<b>32,43</b>	<b>6,28</b>	<b>95</b>
<b>Persentase</b>		<b>12,5%</b>	<b>46,8%</b>	<b>34,1%</b>	<b>6,6%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan 2012*

Dari tabel 5.12 diatas yaitu rekapitulasi dapat diketahui bahwa secara keseluruhan indikator Menetapkan Alat Ukur atau Standar dalam Pengawasan terhadap Gabungan Kelompok Tani yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir yang penulis ajukan kepada responden termasuk dalam kategori



“Baik” yaitu dengan rata-rata 44,43 dengan persentase 46,8% dari total 95 responden.

#### **b. Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi**

Dalam pengawasan terhadap Gabungan Kelompok Tani, penetapan alat ukur atau standar tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak disertai dengan melakukan tindakan penilaian atau evaluasi dalam kegiatan pengawasan tersebut agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya bisa tercapai dengan baik. Oleh karena itu digunakan langkah kedua yaitu melakukan tindakan penilaian atau evaluasi. Dengan adanya tindakan penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir maka kita dapat melihat sejauh mana pengawasan dapat membentuk kelompok tani menjadi kearah yang lebih baik dalam mengembangkan usaha tanaman pangan dan hortikultura sehingga tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya bisa tercapai.

Kemudian, dibawah ini akan disajikan hasil penelitian penulis mengenai pelaksanaan pengawasan yaitu melakukan tindakan penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan, berdasarkan indikatornya yaitu sebagai berikut :

##### **1. Laporan Tertulis Baik Rutin Maupun Istimewa**

Untuk mengetahui bagaimana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam membuat laporan baik rutin maupun istimewa serta untuk mengetahui bagaimana laporan yang dibuat oleh

kelompok tani agar kelompok tani bisa berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan hasil jawaban dari responden dapat kita lihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.13**  
**Tanggapan Responden Mengenai Laporan Tertulis dalam**  
**Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan,**  
**Hortikultura dan Peternakan**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	2	2,1%
2	Baik	51	53,7%
3	Kurang Baik	33	34,7%
4	Tidak Baik	9	9,5%
<b>Jumlah</b>		<b>95 Orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel 5.13 diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai laporan tertulis dalam melakukan pengawasan yang dibuat oleh pegawai dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan pada kelompok tani yaitu tanggapan responden “Sangat Baik” berjumlah 2 orang (2,1%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan laporan tertulis Sangat Baik, dan yang menjawab “Baik” berjumlah 51 orang (53,7%) yang artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan laporan tertulis dengan baik dalam hal pengawasan, kemudian yang menjawab “Kurang Baik” berjumlah 33 orang (34,7%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Kurang Baik dalam membuat laporan tertulis dalam hal pengawasan pada Kelompok Tani dan yang menjawab “Tidak Baik” berjumlah 9 orang (9,5%) yang artinya Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tidak Baik dalam pembuatan Laporan tertulis pada pengawasan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari jawaban responden didominasi dengan jawaban “Baik” artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir sudah Efektif dalam membuat laporan tertulis baik rutin maupun istimewa dalam melakukan pengawasan terhadap Kelompok Tani agar kelompok tani tadi bisa berkembang menjadi lebih baik.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden tentang penindaklanjutan laporan yang diberikan kelompok tani kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

#### 5.14

##### **Tanggapan Responden mengenai Penindaklanjutan Laporan yang diberikan Kelompok Tani kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	2	2,1%
2	Baik	51	53,7%
3	Kurang Baik	37	38,9%
4	Tidak Baik	5	5,3%
<b>Jumlah</b>		<b>95 Orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel 5.14 diatas dapat dilihat dari jawaban responden mengenai bagaimana penindaklanjutan laporan yang dibuat oleh kelompok tani yang diberikan kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, adapun jawaban responden yang

dapat kita lihat yaitu responden yang menjawab “Sangat Baik” berjumlah 2 orang (2,1%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab Inhil telah menindaklanjuti laporan Kelompok Tani dengan sangat baik, yang menjawab “Baik” berjumlah 51 orang (53,7%) yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Inhil telah menindaklanjuti laporan Kelompok Tani dengan baik, dan yang menjawab “Kurang Baik” berjumlah 37 orang (38,9%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Inhil kurang baik dalam menindaklanjuti laporan yang diberikan Kelompok Tani, dan yang menjawab “Tidak Baik” berjumlah 5 orang (5,3%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Inhil tidak baik dalam hal menindaklanjuti laporan yang diberikan Kelompok Tani.

Berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa jawaban dari responden didominasi dengan jawaban “Baik” artinya laporan yang dibuat oleh kelompok tani telah ditindak lanjuti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah penindaklanjutan laporan yang dibuat kelompok tani kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan dengan baik, adapun jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.15**  
**Tanggapan Responden Mengenai apakah Penindaklanjutan Laporan**  
**yang diberikan Kelompok Tani kepada Dinas Tanaman Pangan,**  
**Hortikultura dan Peternakan sudah berjalan dengan Baik**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	9	9,5%
2	Baik	48	50,5%
3	Kurang Baik	34	35,8%
4	Tidak Baik	4	4,2%
<b>Jumlah</b>		<b>95 Orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel 5.15 diatas dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai apakah dalam penindaklanjutan laporan yang dibuat kelompok tani yang diberikan kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan dengan baik, dan adapun jawaban dari responden yaitu responden yang menjawab “Sangat Baik” berjumlah 9 orang (9,5%) yang artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil sangat baik dalam menindaklanjuti laporan dari Kelompok Tani, kemudian yang menjawab “Baik” sebanyak 48 orang (50,5%) yang artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil telah baik dalam melakukan penindaklanjutan laporan yang diberikan oleh Kelompok Tani, dan yang menjawab “Kurang Baik” sebanyak 34 orang (35,8%) yang artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil kurang Baik dalam melakukan penindaklanjutan laporan yang diberikan oleh Kelompok Tani dan yang menjawab “Tidak Baik” sebanyak 4 orang (4,2%) artinya Dinas Tanaman Panga, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil tidak Baik dalam melakukan penindaklanjutan laporan yang dibrikan Kelompok Tani.

Berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan dari jawaban para responden yang didominasi dengan jawaban “Baik” yang artinya penindaklanjutan laporan yang dibuat oleh kelompok tani kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan dengan baik.

## 2. Melakukan Kunjungan Langsung

Untuk mengetahui bagaimana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan kunjungan langsung terhadap kelompok tani dalam upaya melakukan pengawasan agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya bisa berjalan dengan baik, dan hasil jawaban dari responden dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 5.16**  
**Tanggapan Responden Mengenai Kunjungan Langsung yang**  
**Dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan**  
**Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	6	6,3%
2	Baik	52	54,7%
3	Kurang Baik	32	33,7%
4	Tidak Baik	5	5,3%
<b>Jumlah</b>		<b>95 Orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari data tabel 5.16 diatas dapat dilihat dari jawaban tanggapan responden tentang kunjungan Langsung yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu responden yang menjawab “Sangat Baik” berjumlah 6 orang (6,3%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil

sangat baik dalam melakukan kunjungan langsung, yang menjawab “Baik” berjumlah 52 orang (54,7%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil telah baik dalam melakukan kunjungan langsung, serta yang menjawab “Kurang Baik” berjumlah 32 orang (33,7%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil kurang baik dalam melakukan kunjungan langsung, dan yang menjawab “Tidak Baik” berjumlah 5 orang (95,3%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil tidak baik dalam melakukan kunjungan langsung pada Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jawaban dari responden didominasi dengan jawaban “Baik” yang artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan kunjungan langsung kepada kelompok tani yang mana bertujuan agar berkembangnya suatu kelompok tani menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Bapak Rurohman, STT, dan beliau mengatakan :

“Kunjungan secara langsung yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir tergantung pada kebutuhan kelompok tani dan tidak terjadwal, terkadang petani mempunyai masalah dan baru pegawai datang kelapangan, serta ada juga kunjungan yang dilakukan pada musim tertentu seperti musim tanam dan musim panen dan ketika itu dibina dengan baik yang dilakukan oleh pegawai terhadap kelompok tani”. (wawancara, 26 Desember 2012)

Kemudian berdasarkan hasil observasi dilokasi penelitian, penulis melihat ada indikasi bahwa kunjungan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka Pengawasan pada Kelompok Tani masih belum maksimal, yaitu dalam hal kunjungan langsung pada kelompok tani belum maksimal, hal ini didasarkan oleh pendapat oleh salah satu sekretaris Kelompok Tani Mawar I Desa Sungai Beringin yaitu Bapak Ismail, dalam wawancara dengan penulis beliau mengatakan :

“Kunjungan yang dilakukan oleh Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam rangka melakukan pengawasan masih belum maksimal dalam arti mereka melakukan kunjungan secara langsung jarang atau kurang aktif, seperti waktu tag dikehendaki petani ketika petani mengalami masalah seperti ada serangan hama dan pada waktu itu terkadang pihak dari pengawas tidak datang dan pada saat masalah sudah selesai baru pihak dari pengawas datang, dan ini mengatakan bahwa kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan pada kelompok Tani.” **(wawancara, 17 Desember 2012)**

Dari perbedaan hasil pembahasan data kuesioner dan wawancara yang penulis dapatkan, disini penulis menganalisa bahwa ada indikasi kendala-kendala yang dihadapi pegawai yang melakukan pengawasan pada kelompok tani sehingga kunjungan langsung yang dilakukan oleh pengawas belum maksimal. Hal ini tentu menjadi problema baik dari pihak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan maupun dari pihak petani yang tergabung dalam Kelompok Tani, sehingga ketika petani mengalami suatu masalah, pihak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan tidak bisa bertindak cepat dalam menyelesaikan permasalahan



yang terjadi pada kelompok tani karena kurangnya informasi langsung dari Kelompok Tani ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

Kemudian untuk mengetahui bagaimanakah pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir kepada kelompok tani dapat kita lihat pada tabel jawaban responden sebagai berikut :

**Tabel 5.17**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pembinaan yang dilakukan oleh**  
**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten**  
**Indragiri Hilir**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	14	14,7%
2	Baik	49	51,6%
3	Kurang Baik	30	31,6%
4	Tidak Baik	2	2,1%
<b>Jumlah</b>		<b>95 Orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel 5.17 diatas dapat dilihat bahwa jawaban dari responden tentang pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu jawaban dari responden yang menjawab “Sangat Baik” berjumlah 14 orang (14,7%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil sangat baik dalam melakukan pembinaan pada Kelompok Tani, kemudian yang menjawab “Baik” sebanyak 49 orang (51,6%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil sudah baik dalam melakukan pembinaan pada Kelompok Tani, dan yang menjawab “Kurang Baik” sebanyak 30 orang (31,6%) yang artinya Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil kurang baik dalam melakukan pembinaan pada Kelompok Tani serta yang menjawab “Tidak Baik” sebanyak 2 orang (2,1%) yang artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil tidak baik dalam melakukan pembinaan pada Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban dari responden didominasi dengan jawaban “Baik” yang artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan pembinaan kepada Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan yang bertujuan agar petani dapat berkembang menjadi lebih baik.

Namun berdasarkan hasil observasi dilokasi penelitian, penulis melihat bahwa pembinaan yang dilakukan Pegawai dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri hilir kurang maksimal, hal ini dibenarkan oleh pendapat salah satu masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan yaitu Bapak Abdus, dalam wawancara dengan penulis beliau mengatakan :

“Pembinaan yang dilakukan pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir masih belum maksimal, contohnya adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa pupuk itu banyak sekali datang, seharusnya ada pembinaan dari pegawai yang melakukan pengawasan agar petani tadi tahu bagaimana cara meggunakannya sehingga tidak ada kesalahan dalam bertani, tetapi dari pihak Dinas sendiri kurang aktif dalam hal pembinaan, mereka datang disaat petani tidak ada masalah, kemudian pada masalah peralatan atau alat-alat mesin pertanian juga masih belum lengkap shingga dalam proses pertanian sering terhambat”.(wawancara, 19 Desember 2012)

Dari hasil wawancara diatas, dapat penulis analisa bahwa pembinaan yang dilakukan Dinas terkait belum maksimal, seharusnya agar tidak ada terjadinya permasalahan-permasalahan pada kelompok tani maka dari pihak pengawas harus lebih aktif dalam mengadakan pembinaan, baik dalam melakukan bagaimana cara menggunakan pupuk yang baik, cara penggunaan mesin dan sebagainya sehingga tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya bisa berjalan dengan baik. Serta seharusnya dari Dinas sendiri harus mengusahakan agar peralatan atau alat-alat mesin pertanian yang diinginkan kelompok tani bisa ada sehingga para petani akan lebih mudah dalam mengembangkan pertaniannya.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden tentang ketepatan waktu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan kunjungan secara langsung dapat kita lihat dari jawaban responden pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.18**  
**Tanggapan Responden Mengenai Ketepatan Waktu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Melakukan Kunjungan Langsung**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	11	11,6%
2	Baik	34	35,8%
3	Kurang Baik	39	41%
4	Tidak Baik	11	11,6%
<b>Jumlah</b>		<b>95 Orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel 5.18 diatas dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai ketepatan waktu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan kunjungan

langsung kepada Kelompok Tani yaitu, responden yang menjawab “Sangat Baik’ sebanyak 11 orang (11,6%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil sangat baik dalam ketepatan waktu melakukan kunjungan secara langsung, kemudian responden yang menjawab “Baik” Sebanyak 34 orang (35,8%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil sudah baik dalam ketepatan waktu melakukan kunjungan langsung pada Kelompok Tani,dan responden yang menjawab “Kurang Baik” sebanyak 39 orang (41%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil kurang baik dalam ketepatan waktu melakukan kunjungan langsung pada Kelompok Tani serta responden yang menjawab “Tidak Baik” Sebanyak 11 orang (11,6%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil selalu tidak tepat waktu dalam melakukan kunjungan langsung pada Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban dari responden didominasi dengan jawaban ‘Kurang Baik” yang artinya Pegawai dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir terkadang tidak tepat waktu dalam melakukan kunjungan secara langsung kepada kelompok tani.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden tentang apakah kunjungan secara langsung yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada gabungan

kelompok tani sudah berjalan dengan baik. Untuk melihat tanggapan responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.19**  
**Tanggapan Responden Mengenai Apakah Kunjungan Secara**  
**Langsung oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Sudah Berjalan Dengan Baik**

<b>No</b>	<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Sangat Baik	8	8,4%
2	Baik	42	44,2%
3	Kurang Baik	34	35,8%
4	Tidak Baik	11	11,6%
<b>Jumlah</b>		<b>95 Orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel 5.19 diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden mengenai apakah kunjungan langsung yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan dengan baik, adapun jawaban dari responden yaitu yang menjawab “Sangat Baik” sebanyak 8 orang (8,4%) artinya kunjungan langsung yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil berjalan dengan sangat baik, dan yang menjawab “Baik” sebanyak 42 orang (44,2%) yaitu kunjungan langsung yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil sudah berjalan dengan baik, dan yang menjawab “Kurang Baik” sebanyak 34 orang (11,6%) artinya kunjungan langsung yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil kurang berjalan dengan baik dan yang menjawab “Tidak Baik” sebanyak 11 orang (11,6%) yang artinya kunjungan langsung yang dilakukan oleh

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jawaban dari responden didominasi dengan jawaban “Baik” yaitu kunjungan secara langsung yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan dengan baik.

### 3. Mengamati Hasil Kerja

Untuk mengetahui bagaimana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengamati hasil kinerja dari gabungan kelompok tani dalam upaya melakukan pengawasan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 5.20**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pengamatan Hasil Kinerja yang Dilakukan Oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Gabungan Kelompok Tani**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentasi
1	Sangat Baik	10	10,5%
2	Baik	55	57,9%
3	Kurang Baik	28	29,5%
4	Tidak Baik	2	2,1%
<b>Jumlah</b>		<b>95 Orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel 5.20 diatas dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai Bagaimana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengamatan hasil kinerja para gabungan kelompok tani dapat dilihat yaitu responden yang menjawab “Sangat Baik” sebanyak 10 orang (10,5%) yaitu Dinas

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil sangat baik dalam melakukan pengamatan hasil kinerja Kelompok Tani, kemudian yang menjawab “Baik” sebanyak 55 orang (57,9%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil telah baik dalam melakukan pengamatan hasil kinerja Kelompok Tani, dan yang menjawab “Kurang Baik” sebanyak 28 orang (29,5%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil kurang baik dalam melakukan pengamatan hasil kinerja pada Kelompok Tani, dan yang menjawab “Tidak Baik” sebanyak 2 orang (2,1%) yang artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil tidak baik dalam melakukan pengamatan hasil kinerja pada Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan.

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat dari jawaban para responden didominasi dengan dengan jawaban “Baik” yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir sudah Baik dalam melakukan pengamatan hasil kinerja kelompok tani dalam upaya pengawasan.

Kemudian untuk mengetahui apakah rutin Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pengamatan hasil kinerja kelompok tani maka berdasarkan hasil jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.21**  
**Tanggapan Responden Mengenai Apakah Rutin Pengamatan Hasil Kerja yang Dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	8	8,4%
2	Baik	55	57,9%
3	Kurang Baik	25	26,3%
4	Tidak Baik	7	7,4%
<b>Jumlah</b>		<b>95 Orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari Tabel 5.21 diatas dapat dilihat dari jawaban responden mengenai apakah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir rutin dalam melakukan pengamatan hasil kinerja kelompok tani dan responden yang menjawab “Sangat Baik” berjumlah 8 orang (8,4%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil sangat rutin dalam melakukan pengamatan hasil kinerja Kelompok Tani, kemudian yang menjawab “Baik” sebanyak 55 orang (57,9%) yang artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil rutin dalam melakukan pengamatan hasil kinerja Kelompok Tani,dan yang menjawab “Kurang Baik” sebanyak 25 orang (26,3%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil kurang rutin dalam melakukan pengamatan hasil kinerja pada Kelompok Tani, serta yang menjawab “Tidak Baik” sebanyak 7 orang (7,4%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil tidak rutin dalam melakukan pengamatan hasil kinerja Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan.



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari jawaban responden didominasi dengan jawaban “Baik” yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir selalu rutin melakukan pengamatan hasil kinerja kelompok tani di Kecamatan Tembilahan.

Kemudian untuk melihat tanggapan responden mengenai Apakah pengamatan hasil kineja yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan dengan baik, maka dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.22**  
**Tanggapan Responden Mengenai Apakah Pengamatan Hasil Kerja yang Dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sudah Berjalan Dengan Baik**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	12	12,6%
2	Baik	51	53,7%
3	Kurang Baik	22	23,2%
4	Tidak Baik	10	10,5%
<b>Jumlah</b>		<b>95 Orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel 5.22 diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden mengenai sudah berjalan dengan baik pengamatan hasil kinerja yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, dan responden yang menjawab “Sangat Baik” sebanyak 12 orang (12,6%) artinya pengamatan hasil kinerja yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil sudah berjalan dengan sangat baik, kemudian yang menjawab “Baik” sebanyak 51 orang (53,7%) yang artinya pengamatan hasil kinerja yang

dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil sudah berjalan dengan baik, dan yang menjawab “Kurang Baik” sebanyak 22 orang (23,2%) artinya pengamatan hasil kinerja yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil kurang berjalan dengan baik serta responden yang menjawab “Tidak Baik” sebanyak 10 orang (10,5%) artinya pengamatan hasil kinerja Kelompok Tani yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden didominasi dengan jawaban “Baik” yang artinya pengamatan hasil kinerja yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan dengan baik.

Kemudian untuk mengetahui rekapitulasi jawaban responden mengenai indikator variabel Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 5.23**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi dalam Pengawasan yang Dilakukan Oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan**

No	Indikator Pengukuran	Klasifikasi Tanggapan Responden				
		Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	Jumlah
1	Laporan Tertulis Baik Rutin Maupun Istimewa	2 (2,1%)	51 (53,7%)	33 (34,7%)	9 (9,5%)	95
2	Penindaklanjutan Laporan Kelompok Tani	2 (2,1%)	51 (53,7%)	37 (38,9%)	5 (5,3%)	95
3	Apakah Penindaklanjutan Laporan Kelompok Tani Sudah Berjalan Dengan Baik	9 (9,5%)	48 (50,5%)	34 (35,8%)	4 (4,2%)	95
4	Melakukan Kunjungan Langsung	6 (6,3%)	52 (54,7%)	32 (33,7%)	5 (5,3%)	95
5	Pembinaan Kelompok Tani	14 (14,7%)	49 (51,6%)	30 (31,6%)	2 (2,1%)	95
6	Ketepatan Waktu Melakukan Kunjungan Langsung	11 (11,6%)	34 (35,8%)	39 (41%)	11 (11,6%)	95
7	Apakah Kunjungan Langsung Sudah Berjalan dengan Baik	8 (8,4%)	42 (44,2%)	34 (35,8%)	11 (11,6%)	95
8	Pengamatan Hasil Kinerja	10 (10,5%)	55 (57,9%)	28 (29,5%)	2 (2,1%)	95
9	Rutin dalam Pengamatan Hasil Kerja	8 (8,4%)	55 (57,9%)	25 (26,3%)	7 (7,4%)	95
10	Apakah Pengamatan Hasil Kerja Sudah Berjalan dengan Baik	12 (12,6%)	51 (53,7%)	22 (23,2%)	10 (10,5%)	95
<b>Jumlah</b>		<b>82</b>	<b>488</b>	<b>314</b>	<b>66</b>	<b>950</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>8,2</b>	<b>48,8</b>	<b>31,4</b>	<b>6,6</b>	<b>95</b>
<b>Persentase</b>		<b>8,63%</b>	<b>51,37%</b>	<b>33,05%</b>	<b>6,95%</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan 2012*

Dari tabel 5.23 rekapitulasi diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan indikator Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi dalam Pengawasan pada Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir yang penulis ajukan kepada responden termasuk dalam kategori “Baik” yaitu rata-rata jawaban dari responden sebanyak 48,8 dengan persentase 51,37% dari total 95 responden.

### **c. Melakukan Tindakan Perbaikan**

Melakukan tindakan perbaikan merupakan kegiatan yang harus dilakukan apabila terjadinya suatu penyimpangan-penyimpangan atau suatu permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga perlu diadakan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan. Tindakan perbaikan ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan.

Kemudian dibawah ini akan disajikan hasil penelitian penulis mengenai pelaksanaan pengawasan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan, yang berdasarkan indikator sebagai berikut :

#### **1. Memberi Teguran dan Peringatan Terhadap Penyimpangan**

Untuk mengetahui bagaimana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan teguran ataupun peringatan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang

terjadi pada kelompok tani dalam upaya melakukan pengawasan dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 5.24**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pemberian Teguran atau**  
**Peringatan Terhadap penyimpangan oleh Kelompok Tani yang**  
**Dilakukan Oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan**  
**Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	6	6,3%
2	Baik	55	57,9%
3	Kurang Baik	27	28,4%
4	Tidak Baik	7	7,4%
<b>Jumlah</b>		<b>95 Orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel 5.24 diatas dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai Bagaimana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan teguran ataupun peringatan terhadap penyimpangan atau masalah yang terjadi pada kelompok tani dalam upaya melakukan pengawasan, dan responden yang menjawab “Sangat Baik” sebanyak 6 orang (6,3%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil sangat baik dalam memberikan teguran atau peringatan terhadap penyimpangan yang terjadi, kemudian yang menjawab “Baik” sebanyak 55 orang (57,9%) yang artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil sudah baik dalam memberikan teguran atau peringatan terhadap permasalahan yang terjadi, dan yang menjawab “Kurang Baik” sebanyak 27 orang (28,4%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil kurang baik dalam memberikan peringatan atau teguan terhadap masalah

atau penyimpangan pada Kelompok Tani dan yang menjawab “Tidak Baik” sebanyak 7 orang (7,4%) yang artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil tidak baik dalam memberikan peringatan terhadap masalah yang terjadi pada Kelompok Tani.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari jawaban responden didominasi dengan jawaban “Baik” yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir telah Efektif dalam memberika teguran atau peringatan terhadap masalah atau penyimpangan yang terjadi pada kelompok tani di Kecamatan Tembilahan.

Kemudian berdasarkan hasil observasi dilokasi penelitian yang peneliti lakukan bahwa ada terjadinya suatu permasalahan yang terjadi pada kelompok tani, hal ini dibenarkan dengan pernyataan salah seorang pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Bapak Surohman, S,ST, dalam hasil wawancara dengan penulis dan beliau mengatakan :

“pelaksanaan kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir belum dilaksanakan 100% disebabkan karena untuk fisik sendiri ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan yaitu kegiatan pengembangan sumber daya pertanian karena keadaan banjir. Kemudian adanya cetak sawah didesa kuala sebatu gagal karena kelalaian dari pihak ketiga, kemudian dalam mengatasi hal ini telah diadakannya komunikasi antara dinas dengan pihak yang terkait untuk memperhitungkan kondisi alam yang ada dan bahkan telah diadakan teguran tertulis kepada pihak yang terkait (kontraktor) untuk mempercepat dan menyelesaikan pekerjaan. Kemudian terjadi juga permasalahan yaitu belum optimalnya pemanfaatan sumber daya pertanian yang menyebabkan tidak tercukupinya kebutuhan akan beras pada masyarakat Indragiri Hilir sendiri”.(wawancara, 26 Desember 2012)

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti menganalisa bahwa terdapatnya suatu permasalahan yang terjadi pada petani seperti pada kondisi alam yang menyebabkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya tidak bisa berjalan dengan baik, kemudian belum optimalnya pemanfaatan sumber daya yang ada sehingga menyebabkan kebutuhan dalam konsumsi masyarakat tidak bisa terpenuhi. Dan seharusnya pihak Dinas harus lebih optimal dalam menganalisa kondisi alam yang ada dan seharusnya lahan-lahan yang belum dimanfaatkan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.

Kemudian untuk melihat tanggapan responden mengenai Apakah sudah berjalan dengan baik teguran atau peringatan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.25**  
**Tanggapan Responden Mengenai Apakah Pemberian Teguran atau Peringatan yang Dilakukan Oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Sudah Berjalan Dengan Baik**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	2	2,1%
2	Baik	63	66,3%
3	Kurang Baik	26	27,4%
4	Tidak Baik	4	4,2%
<b>Jumlah</b>		<b>95 Orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel 5.25 diatas dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai Apakah sudah berjalan dengan baik pemberian teguran atau peringatan yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Peternakann terhadap suatu permasalahan atau penyimpangan yang terjadi pada kelompok tani, adapun jawaban dari responden yang menjawab “Sangat Baik” sebanyak 2 orang (2,1%) artinya pemberian teguran yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil sudah berjalan dengan baik, kemudian yang menjawab “Baik” sebanyak 63 orang (66,3%) artinya peringatan atau teguran yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil sudah berjalan dengan baik, kemudian yang menjawab “Kurang Baik” sebanyak 26 orang (27,4%) yang artinya pemberian teguran atau peringatan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil kurang baik dan yang menjawab “Tidak Baik” sebanyak 4 orang (4,2%) artinya peringatan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil dikategorikan tidak baik.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari jawaban responden didominasi dengan jawaban “Baik” yang artinya pemberian teguran atau peringatan atas terjadinya suatu masalah pada kelompok tani yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sudah berjalan dengan baik.

## 2. Melakukan Tindakan Perbaikan

Untuk mengetahui bagaimana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan tindakan perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan yang terjadi pada kelompok tani dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 5.26**  
**Tanggapan Responden Mengenai Tindakan Perbaikan yang**  
**Dilakukan Oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan**  
**Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	9	9,5%
2	Baik	49	51,6%
3	Kurang Baik	23	24,2%
4	Tidak Baik	14	14,7%
<b>Jumlah</b>		<b>95 Orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel 5.26 diatas dapat dilihat bahwa tanggapan dari responden mengenai tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, dan responden yang menjawab “Sangat Baik” sebanyak 9 orang (9,5%) yang artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil telah melakukan tindakan perbaikan dengan sangat baik, kemudian yang menjawab “Baik” sebanyak 49 orang (51,6%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil telah baik dalam melakukan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi, serta yang menjawab “Kurang Baik” sebanyak 23 orang (24,2%) yang artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil kurang baik dalam melakukan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi dan yang menjawab “Tidak Baik” sebanyak 14 orang (14,7%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil tidak baik dalam melakukan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi pada Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jawaban dari responden didominasi dengan jawaban “Baik” yang artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dikategorikan “Baik” dalam melakukan tindakan perbaikan terhadap kelompok tani dalam melakukan pengawasan.

Kemudian berdasarkan hasil observasi dilokasi penelitian , penulis melihat bahwa tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sudah bisa dikatakan kurang maksimal, hal ini dibenarkan oleh pendapat salah satu Sekretaris Kelompok Tani yaitu Bapak Ismail, dalam wawancara dengan penulis beliau mengatakan :

“Tujuan dari dibentuknya Kelompok Tani ini yaitu agar lebih mudah dalam mengkoordinasi petani, sehingga diadakannya suatu musyawarah tentang kesamaan dalam melakukan penanaman padi, kemudian dalam terjadi permasalahan seperti serangan hama, pihak dinas sendiri kurang maksimal dalam melakukan tindakan perbaikan karena ketika petani dalam keadaan bermasalah pihak dari Dinas sendiri tidak ada dan ketika masalah sudah selesai barulah pengawas dari Dinas datang, tetapi mereka juga melakukan tindakan perbaikan meskipun tidak maksimal atau perbaikan yang mereka lakukan terkadang tidak tepat dengan waktu masalah yang terjadi pada petani”.**(wawancara, 17 Desember 2012)**

Dari hasil wawancara tadi dapat penulis analisa bahwa pengawas dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan kurang maksimal dalam mengatasi suatu permasalahan yang terjadi pada kelompok tani, hal ini berkaitan dengan kunjungan secara langsung dan informasi yang dilakukan oleh petani dengan Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Peternakan sendiri, sehingga permasalahan tersebut lambat dalam penyelesaiannya.

Kemudian untuk melihat tanggapan responden tentang Apakah rutin Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan tindakan perbaikan setiap terjadinya permasalahan atau penyimpangan kelompok tani dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.27**  
**Tanggapan Responden Apakah Rutin Melakukan Tindakan Perbaikan yang Dilakukan Oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	5	5,26%
2	Baik	57	60%
3	Kurang Baik	26	27,37%
4	Tidak Baik	7	7,37%
<b>Jumlah</b>		<b>95 Orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel 5.27 diatas dapat dilihat dari jawaban responden tentang apakah rutin Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan tindakan perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan yang terjadi pada kelompok tani dapat dilihat bahwa responden yang menjawab “Sangat Baik” berjumlah 5 orang (5,26%) artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil selalu rutin melakukan tindakan perbaikan, kemudian yang menjawab “Baik” berjumlah 57 orang (60%) yang artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil rutin dalam melakukan tindakan perbaikan, yang menjawab “Kurang Baik” berjumlah 26 orang

(27,37%) yang artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil kurang rutin dalam melakukan tindakan perbaikan, dan yang menjawab “Tidak Baik” berjumlah 7 orang (7,37%) yang artinya Dinas Tanaman, Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil tidak rutin dalam melakukan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi pada Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari jawaban responden disominasi dengan jawaban “Baik” yang artinya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir selalu melakukan tindakan perbaikan apabila terjadinya suatu permasalahan atau penyimpangan pada kelompok tani.

Kemudian untuk melihat tanggapan responden mengenai mutu jalan keluar yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.28**  
**Tanggapan Responden Mengenai Mutu Jalan Keluar yang Dilakukan**  
**Oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan**  
**Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	17	17,89%
2	Baik	52	54,74%
3	Kurang Baik	18	18,95%
4	Tidak Baik	8	8,42%
<b>Jumlah</b>		<b>95 Orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2012*

Dari tabel 5.28 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban dari responden mengenai Bagaimana mutu jalan keluar yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan pada Kelompok Tani,

adapun jawaban dari responden yaitu yang menjawab “Sangat Baik” sebanyak 17 orang (17,89%) artinya mutu jalan keluar yang diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil sangat baik, yang menjawab “Baik” sebanyak 52 orang (54,74%) yang artinya mutu jalan keluar yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil sudah baik, yang menjawab “Kurang Baik” sebanyak 18 orang (18,95%) artinya mutu jalan keluar yang diberikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil kurang baik dan yang menjawab “Tidak Baik” sebanyak 8 orang (8,42%) yang artinya mutu jalan keluar yang diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Inhil tidak baik.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari jawaban para responden didominasi dengan jawaban “Baik” yaitu mutu jalan keluar dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir sudah Efektif atau Baik.

Kemudian untuk mengetahui rekapitulasi jawaban responden mengenai indikator Melakukan Tindakan Perbaikan dalam Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 5.29**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Melakukan Tindakan Perbaikan Terhadap Kelompok Tani yang Dilakukan Oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Indikator	Klasifikasi Tanggapan Responden				
		Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	Jumlah
1	Pemberian Teguran dan Peringatan Terhadap Penyimpangan	6 (6,3%)	55 (57,9%)	27 (28,4%)	7 (7,4%)	95
2	Apakah Pemberian Teguran dan Peringatan Sudah Berjalan dengan Baik	2 (2,1%)	63 (66,3%)	26 (27,4%)	4 (4,2%)	95
3	Tindakan Perbaikan	9 (9,5%)	49 (51,6%)	23 (24,2%)	14 (14,7%)	95
4	Apakah Rutin Melakukan Tindakan Perbaikan	5 (5,26%)	57 (60%)	26 (27,37%)	7 (7,37%)	95
5	Mutu Jalan Keluar Terhadap Masalah	17 (17,89)	52 (54,74%)	18 (18,95%)	8 (8,42%)	95
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>	<b>276</b>	<b>120</b>	<b>40</b>	<b>475</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>7,8</b>	<b>55,2</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>95</b>
<b>Persentase</b>		<b>8,2%</b>	<b>58,1%</b>	<b>25,3%</b>	<b>8,4%</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan 2012*

Dari tabel 5.29 rekapitulasi diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan indikator Melakukan Tindakan Perbaikan pada Kelompok Tani dalam melakukan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir yang penulis ajukan kepada responden termasuk dalam kategori “Baik”, yaitu rata-rata jawaban dari responden sebanyak 55,2 dengan persentase 58,1% dari total 95 responden.

Adapun untuk melihat rekapitulasi keseluruhan jumlah rata-rata tanggapan responden tentang Efektivitas Pengawasan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan, berdasarkan indikator-indikatornya yaitu sebagai berikut

**Tabel 5.30**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator-Indikator**  
**Efektivitas Pengawasan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan**  
**Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Indikator Variabel	Klasifikasi Jumlah Rata-Rata Tanggapan Responden				
		Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	Jumlah
1	Menetapkan Alat Ukur atau Standar	11,86 (12,5%)	44,43 (46,8%)	32,43 (34,1%)	6,28 (6,6%)	95
2	Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi	8,2 (8,63%)	48,8 (51,37%)	31,4 (33,05%)	6,6 (6,95%)	95
3	Melakukan Tindakan Perbaikan	7,8 (8,2%)	55,2 (58,1%)	24 (25,3%)	8 (8,4%)	95
Jumlah		27,86	148,43	87,83	20,88	285
Rata-Rata		9,28	49,48	29,28	6,96	95
Persentase		9,77%	52,08%	30,82%	7,33%	100%

*Sumber : Data Olahan 2012*

Dari tabel 5.30 rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa jumlah rata-rata tanggapan responden mengenai Efektivitas Pengawasan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan, yang menyatakan “Sangat Baik” dengan rata-rata 9,28 yang persentasenya 9,77%, dan yang menjawab “Baik” dengan jumlah rata-rata 49,48 yang persentasenya 52,08%, dan yang menjawab

“Kurang Baik” dengan rata-rata 29,28 yang persentasenya 30,83% , sedangkan yang menjawab “Tidak Baik” dengan rata-rata 6,96 yang persentasenya 7,33%.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan indikator variabel yang penulis ajukan kepada responden mengenai Efektivitas Pengawasan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan, termasuk dalam kategori “Baik”, dimana indikator-indikator tersebut meliputi : Menetapkan alat ukur atau standar, Melakukan tindakan penilaian atau evaluasi, dan Melakukan tindakan perbaikan.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah direkapitulasi dari jawaban responden mengenai Efektivitas Pengawasan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan tindakan pengawasan secara baik pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan akan tetapi tidak mengikuti semaksimal mungkin, hal ini dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir khususnya di Kecamatan Tembilahan tidak bisa memenuhi kebutuhan akan padi disebabkan karena dalam proses produksi yang ada terdapatnya kekurangan pada peralatan yang ada pada pertanian, kemudian disebabkan oleh iklim yang tidak menentu, disebabkan karena serangan hama para pertanian serta sistem pertanian yang tidak modern.

#### **6.2 Saran**

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis memberikan saran-saran sebagai pertimbangan kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir demi

tercapainya pengawasan yang Efektif atau Baik, adapun saran-saran tersebut yaitu :

1. Demi tercapainya pengawasan yang efektif, diharapkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir mengusahakan pengawasan berpedoman kepada melakukan alat ukur yang ditetapkan sebelumnya, melakukan tindakan penilaian atau evaluasi dan melakukan tindakan perbaikan.
2. Diharapkan agar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir lebih meningkatkan kunjungan secara langsung dan melakukan suatu pembinaan secara maksimal.
3. Dalam melakukan pengawasan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir harus lebih memperhitungkan kondisi alam sehingga para petani tidak ada kegagalan dalam mengembangkan pertanian.
4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan harus lebih aktif dalam melakukan pembinaan pemanfaatan lahan agar lahan yang kosong bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh petani.
5. Diperlukannya koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi antar lintas sektoral pemanfaatan sumberdaya pertanian, sehingga tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat diraih secara optimal.
6. Dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir harus lebih melakukan suatu teguran maupun suatu peringatan secara tertulis agar permasalahan tersebut dapat diatasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, Mohd. 2001. *Seri Ilmu Sumber Daya Manusia dan Psikology Industri*. Yogyakarta : Liberty
- Fattah, Nanang. 2004. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bina Aksara
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jambi : GP Press
- Kamus Besar Bahasa Indonesia : 2003
- Kansil. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Kartono, Kartini. 2002. *Pimpinan dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Kumorotomo, Wahyudi. 2003. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Pers
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Bina Rupa Aksara
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Maman, Ukas. 2004. *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi* . Bandung : Angnini
- M. Manullang. 2002. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- M. Situmorang, Viktor dan Juhir. 2001. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Negara*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Safrudin, Ateng. 2002. *Pemerintah Daerah dan Pembangunan*. Bandung : Mandar Maju
- Siagian, Sondang P, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- \_\_\_\_\_, 2003. *Manajemen Strategik*. Jakarta : Bumi Aksara
- \_\_\_\_\_, 2004. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta : Bumi Aksara

- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta
- Sujamto. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : Persada Quantum
- Sule dkk. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Kencana Prenada Group
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama
- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Thoha, Miftah. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Umar, Husein. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Winardi. 2003. *Azas-azas manajemen*, terjemahan dari principle of manajemen

## **SKRIPSI**

- Nadia Azlin. 2012. *Analisis Efektifitas Pelayanan Administrasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau*. Pekanbaru

## **Peraturan Perundang-undangan**

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Presiden Republik Indonesia.
- Laporan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir : 2011
- Laporan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir : 2011
- Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2010 yaitu terdapatnya Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi jabatan struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir
- Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2009

### **Ayat Al-Quran**

QS al-Ahzaab Ayat 52

QS al-Maa-idah Ayat 117

QS an-Nisaa' Ayat 1